

TokohIndonesia®

THE EXCELLENT BIOGRAPHY

DotCom

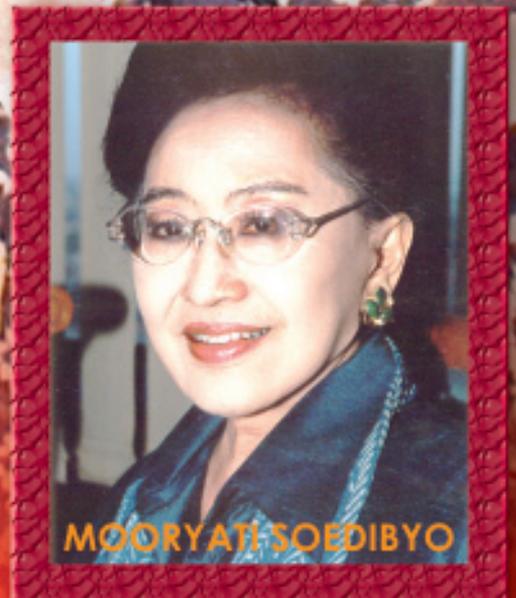
Volume 16 Rp. 14.000

Luar Jabotabek Rp. 15.000

Peletak
Grand
Strategy
Telematika
Indonesia

**SYAMSUL
MU'ARIF**

POLITISI NEGARAWAN DARI KALSEL



MOORYATI SOEDIBYO

kreasi etalase web

www.esero.com

WWW

DESIGN



Esero

Web Design & Hosting

**TOKOH UTAMA:**

Syamsul Mu'arif, Politisi Negarawan dari Kalsel. Hidup bersahaja dan mengalir laksana air. Baginya pedoman hidup adalah nurani dan akal sehat. Dia politisi yang tidak mau mengkhianati hati nurani hanya untuk mendapatkan sesuatu. Dia tidak ambisius! Kader Golkar yang menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kabinet Gotong-Royong, ini berobsesi jadi seorang negarawan. Putra bangsa asal Kalimantan Selatan ini selalu mengutamakan panggilan tugas dan tanggung jawab sesuai posisinya. 7

TOKOH UTAMA: Syamsul Mu'arif, Peletak *Grand Strategy Telematika*. Dalam tiga tahun memimpin Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, dia sudah meletakkan dasar-dasar atau grand strategy pengembangan telematika di Indonesia. Dia pun menggagas kementerian ini berubah dari kementerian negara menjadi departemen. Bukan untuk mengontrol media massa seperti zaman Orde Baru tetapi untuk lebih operasional mewujudkan *information society* dan *knowledge society*. 15

BERITA TOKOH: Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden Pilihan Rakyat 5

KAPUR SIRIH: Harapan Baru 4

SURAT: Berita Terbaru, Riwayat Singkat, Perpustakaan, Nurdin T, dll. 4

WAWANCARA: Syamsul Mu'arif: Langkah Indonesia Menuju *Information Society*. Indonesia sangat tertinggal dalam hal telematika. Padahal sebagaimana dicanangkan ITU dan UNESCO, dunia sedang berlomba menuju tahun 2015 terbentuknya *information society* dan *knowledge society*. Syamsul Mu'arif pun membangunkan mimpi Indonesia menuju masyarakat informasi itu. Walaupun hal itu disadari sangat berat, tetapi harus dimulai. 18

TOKOH PILIHAN: Mooryati Soedibyo, Mustika Jamu Indonesia. Terus melegenda sebagai pakar dan pelaku industri jamu terkemuka yang diakui dunia internasional. Ia penerima anugerah *Best of the Best Entrepreneur of the Year* dari *Ernst & Young*, di Monte Carlo, Monaco 4-8 Juni 2003. Di usia senja ia tetap berbakti kepada bangsa sebagai senator (Dewan Perwakilan Daerah), mewakili DKI Jakarta sambil bergiat menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Indonesia. Sebagai anggota senator tertua, dia pun menjadi pemimpin sementara DPD sampai ketua definitif terpilih..Sang legendaris industri jamu ini tampaknya masih ingin lebih banyak mengukir prestasi dan catatan emas keberhasilan. 32



COVER: Esero Design. **FOTO:** Atur



■ **MAJALAH TOKOH INDONESIA**, THE EXCELLENT BIOGRAPHY ■ **EDISI CETAK:** TOKOHINDONESIA DOTCOM - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA ■ **PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI:** Ch. Robin Simanullang ■ **REDAKTUR EKSEKUTIF/WEBMASTER:** Atur Lorieclide Paniroy ■ **REDAKTUR:** Haposan Tampubolon, Tian Son Lang ■ **SEKRETARIS REDAKSI:** Marjuka Situmorang ■ **STAF REDAKSI:** Christian Natamado, Heru B Utomo ■ **BIRO JABAR:** Sumarsono (Kepala), Imam Siswanto ■ **LAWYER:** Mifa P Singarimbun, SH ■ **KONTRIBUTOR:** Dandy Hendrias, Yoeliani Desianna Somali, Yusak HS, Anis Fuadi, Yayasan Suryatna ■ **TATA GRAFIS:** ESERO Design ■ **DIVISI USAHA:** Adur Nursinta (Kepala) ■ **IKLAN:** Doan Adikara Pudan ■ **SIRKULASI & DISTRIBUSI:** Kedarton Harianja, Willy Sumantri (Jawa Barat) ■ **ALAMAT REDAKSI:** Jalan Bukit Duri Tanjakan IX No.26, Tebet, Jakarta Selatan 12830 ■ **Po Box 4042 JKTJ 13040** ■ **TELEPON (021) 83701736 - 9101871 - 70776232** ■ **FAX:** (021) 9101871 ■ **SMS 0812-949-1043 dan 0813-107-8888-2** ■ **E-MAIL:** redaksi@tokohindonesia.com - iklan@tokohindonesia.com - sirkulasi@tokohindonesia.com ■ **ALAMAT BIRO JAWA BARAT:** Jalan Musaen No.3 Pasirkaliki, Bandung, Telepon-Fax 022-4240689, E-mail: jabar@tokohindonesia.com ■ **SITUS WEB:** www.tokohindonesia.com- www.tokohnasional.com - www.ensiklopedi.com- www.tokoh.net - www.e-ti.com - www.indonesianfamous.com ■ **HARGA:** Rp. 14.000 (Luar Jabotabek Rp. 15.000) ■ **Langganan Rp. 160.000 (12 Edisi)** ■ **TARIF IKLAN:** Cover Rp.20.000.000, Isi Rp.12.500.000 ■ **PENERBIT:** pt. Citraprinsip Publisitas Indoaprint ■ **REKENING:** Bank Niaga Supomo Jakarta No.025.01.24000.00.8 ■ **SERTIFIKAT MEREK:** Ditjen HAKI Departemen Kehakiman, HAM dan Perundang-undangan Agno: D00-02-2395

SURAT

Berita Terbaru

Isi dari Ensiklopedi Tokoh Indonesia udah bagus, namun akan lebih bagus lagi kalo dalam biografi gak hanya latar belakang aja tapi juga berita paling baru dari si tokoh tersebut terutama di bidang politik.

Nunung

E-mail: zzstt_84@yahoo.com

Riwayat Singkat

Sudah bagus, dan harap diperbanyak nama-nama tokoh. Sebagai pengamat ekonomi (di Sumut), saya ingin rubrik ini menempatkan riwayat singkat para pengamat agar bisa diikuti arah pemikirannya dengan baik.

Jhon Tafbu Ritonga

E-mail: smurf_nurf@yahoo.com

Nurdin T

Saya ingin mengetahui e-mail dari Bapak DR. Ir. Nurdin Tampubolon atau pun web beliau. Sudi kiranya TokohIndonesia membantu saya.

Pieldra Sinaga

E-mail: labuffer_pra@yahoo.com

Bikin Tugas

Situs ini keren. Makasih karena beritanya *up to date*, ane bisa bikin tugas dengan benar. Data-data dari situs ini sangat membantu saya.

Rita

rita_fiani@plasa.com

Pahlawan

Saran saya, semua nama-nama Pahlawan Indonesia yang tercantum di *site* ini agar lebih dilengkapi profile-profilenya.

Tony Christya Budiman

tony_christya@yahoo.co.uk

Perpustakaan

Saya sangat senang dengan apa yang ada dalam website Tokoh Indonesia. Sebelum saya ketemu website ini, saya biasa ke perpustakaan namun setelah saya ketemu website ini, saya tidak perlu ke perpustakaan.

Yan Nawipa

yan_nawipa@yahoo.com

Desainnya Kaku

Design website-nya terkesan kaku dan norak! Warna-warna yang ditampilkan dalam *website* ini terkesan tidak modern. Cobalah lebih banyak 'bergaul' dengan website luar, saya yakin website ini akan lebih ok. Mengenai isi, investigasinya terkesan dangkal. Saya yakin apabila Anda mau lebih 'lemas' sedikit, pasti lebih maju!

Adi Kesuma Pasaribu

adi_a@hotmail.com

Harapan Baru

Semua orang sudah jenuh dengan keterpurukan bangsa ini. Tidaklah mengherankan bila kata 'perubahan' menjadi senjata paling ampuh untuk menarik simpati masyarakat. Di benak kita, perubahan biasanya identik dengan barang baru dan harapan baru. Setiap kali anak sekolah masuk tahun ajaran baru, mereka juga berkeinginan bisa memperoleh baju, tas, sepatu dan buku baru. Begitu pula, bagi kita yang memulai sesuatu dari awal atau memulai kehidupan yang baru, rasanya lebih afdol dengan barang baru dan harapan baru.

Semangat ini terasa begitu menghinggapi masyarakat kita. Pengumuman secara resmi dari KPU terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke enam didampingi wakil presiden Yusuf Kalla disambut masyarakat sangat antusias. Masing-masing dengan caranya sendiri merayakan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, sekaligus menunggu terwujudnya perubahan sebagaimana dijanjikan dan diharapkan.

Harapan bahwa Indonesia akan keluar dari keterpurukan mencuat. Diimpikan, dengan presiden baru, Indonesia bisa membenahi kembali kehidupan masyarakatnya yang masih memprihatinkan. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa presiden baru tidak secara otomatis akan mencapai suatu perubahan ke arah yang lebih baik, tanpa dukungan segenap masyarakatnya. Walaupun tentu kita berharap, pergantian presiden akan memberi warna tersendiri dalam usaha mencapai cita-cita bangsa ini, yaitu masyarakat Indonesia yang adil makmur, demokratis dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain.

Di samping itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengunjung website TokohIndonesia.com yang dengan setia memberikan saran agar kami lebih maksimal dalam melengkapi profil para tokoh di website ini. Sesuai dengan cita-cita kami, TokohIndonesia akan hadir sebagai media awam yang tampil apa adanya dalam menyajikan seorang tokoh tanpa determinasi suku, agama, golongan dan aliran politik.

Kehadiran Website dan Majalah Tokoh Indonesia juga tidak lepas dari dukungan para tokoh yang juga menangkap visi dan misi memperkenalkan kepada khalayak luas bahwa ada banyak manusia Indonesia yang bisa diteladani baik gaya hidup, cara berpikir dan karya nyatanya.

Pada volume kali ini, kami menyajikan kisah seorang politisi negarawan dari Kalimantan Selatan yang menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kabinet Gotong-Royong. Selama tiga tahun menjabat menteri,

dia telah memimpin timnya mempersiapkan pondasi dasar menuju terciptanya bangunan Indonesia yang berbasis teknologi informasi. Sehingga pemerintah baru, siapa pun menterinya, sudah tinggal melaju menuju *information society* dan *knowledge society*.

Kami juga menampilkan sosok perempuan pengusaha jamu yang kini duduk di kursi DPD mewakili DKI Jakarta, Ibu Mooryati Soedibyo, sebagai tokoh pilihan. **mlp**

Redaksi

Tarif Iklan Majalah TokohIndonesia

- Cover belakang : Rp.20.000.000
- Cover dalam depan : Rp.16.000.000
- Cover dalam belakang : Rp.15.000.000
- Halaman dalam : Rp.12.500.000



SBY-JK, PILIHAN RAKYAT ■ e-ll/ms

Susilo BY - Jusuf Kalla: Presiden & Wapres Pilihan Rakyat

Inilah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla (MJK). Keduanya paduan sepadan dwitunggal kepemimpinan nasional yang setidaknya merepresentasi Jawa-luar Jawa dan militer-sipil, sama seperti dahulu Indonesia memiliki dwitunggal legendaris Bung Karno-Bung Hatta. Keduanya masing-masing punya *share* dan portofolio tersendiri menuju Istana Kepresidenan 2004-2009.

Berdasarkan perhitungan dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin 4 Oktober 2004, calon Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan wakilnya Muhammad Jusuf Kalla berhasil meraih 69.266.350 suara atau 60,62% pada pemilihan presiden putaran kedua 20 September 2004. Pasangan itu mengungguli Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi, yang meraih 44.990.704 suara atau 39,38% dari total suara sah 114.257.054. Sedangkan, gabungan suara yang tak sah serta pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa dikategorikan sebagai golongan putih, mencapai 35.583.483 suara. Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi hanya menang di empat propinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, dan Maluku. Sedangkan sisanya di 28

propinsi berhasil dimenangkan oleh pasangan SBY-Kalla.

Kemenangan SBY-MJK menandai efektifitas 'berkoalisi dengan rakyat' sebuah wacana antitesa yang sebelumnya dibangun kubu SBY saat berhadapan dengan kubu Megawati-Hasyim Muzadi yang disebutkan dibangun di atas sintesa koalisi elit partai. Setelah kemenangan SBY-MJK diketahui, memang menjadi mudah membenarkan wacana yang sebelumnya berkembang atau sekaligus menyalahkan wacana lain dari kubu Mega-Hasyim. Seperti, tema perubahan yang gencar dikumandangkan kubu SBY-MJK, yang bahkan yakin menyebutkan sekitar 74% rakyat ingin perubahan, sebuah angka

yang dicerminkan oleh persentase pemilih yang tidak memilih Mega-Hasyim, pasangan yang disebut sebagai pilihan anti perubahan atau *status quo*.

Kemenangan SBY-MJK juga menandai banyaknya mimpi dan harapan pembaharuan di tengah kehidupan masyarakat yang masih sulit. Harapan, sebagai sebuah visi atau mimpi, terkadang lebih indah dan nikmat dibanding tersadar dalam realitas yang sesungguhnya. Maklum, ini adalah proses politik yang sebagian orang mengatakan merupakan permainan "seni kemungkinan". Ekspektasi masyarakat akan perubahan, hidup yang lebih aman, lebih adil, lebih demokratis, lebih sejahtera, dan segala nilai lebih lainnya sangat jitu untuk meraih simpati dan popularitas.

Bahkan hingga masuk ke ukuran praktis, seperti janji dan harapan akan ada minimal dua orang anggota kabinet berasal dari Aceh, minimal dua orang anggota kabinet dari suku Minangkabau, empat orang anggota kabinet diisi kaum hawa, dan beragam janji dan harapan lainnya yang jika dimatrikulasi memang bisa saja mudah dipenuhi.

Dukungan Rakyat

Menebar janji dan harapan baru tergolong mudah, jauh lebih mudah daripada mewujudkannya. Segala strata masyarakat di mana pun berada, apa pun profesi dan tingkatan sosial-ekonominya, dalam hari-hari ke depan segera akan menagih janji dan menggantungkan harapan kepada pemerintahan baru. (Kendati yang



SBY-JK, HARAPAN RAKYAT ■ e-ti/ms

memilih SBY-MJK 60,62% pemilih namun persiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono akan mengayomi seluruh warga masyarakat).

Di antaranya, guru ingin segera naik gaji, petani ingin segera memperoleh hasil tani lebih, buruh ingin segera naik upah bebas dari ancaman PHK dan bebas berserikat, nelayan ingin segera menangkap ikan lebih, murid ingin segera mendapat pendidikan bermutu sedangkan orangtua inginkan pendidikan anak yang terjangkau, pedagang ingin bebas dari rasa takut berusaha, petani tebu ingin tak lagi ada gula impor ilegal, kernet bis ingin mendapat penumpang lebih banyak, tapi penumpang pun tak mau bersesak-sesak, dan bermacam harapan masyarakat lainnya.

Hal-hal itu masih ditambah harapan yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif seluruh warga bangsa, seperti keinginan segera hilangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari bumi

pertiwi, pandainya kepolisian menyidik perkara, kejaksaan tegas mengajukan tuntutan, pengacara tak menghalalkan segala cara dan tak harus memenangkan setiap perkara kliennya, hakim adil dan jujur memutuskan perkara, keinginan kehidupan sosial kemasyarakatan yang pluralis, toleran, damai, bebas beribadah sekaligus bebas mendirikan gedung ibadah, kehidupan politik yang lebih demokratis, bebas dari rasa takut (*free of fear*), pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dan listrik yang lebih memadai, pemerintah pusat yang lebih menghargai pemerintah daerah, dan masih sederet harapan kolektif masyarakat lainnya. Kemenangan SBY-MJK adalah pertanda lebih berharapnya masyarakat kepada pasangan ini untuk mengembankan amanah rakyat.

Namun perlu disadari bahwa SBY-MJK bukanlah

manusia super, yang bisa dengan mudah dan cepat memenuhi semua harapan itu. Tanpa dukungan semua pihak, harapan itu tidak mudah diwujudkan. Karenanya berilah dukungan, agar pemerintahan baru dapat mewujudkan janjinya.

Yang pasti keduanya tentu tidak terlalu lama larut dalam suasana

bulan madu. Kinerja 100 hari pemerintahan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kinerja ini, sangat tergantung pada kemampuan para menteri sebagai pembantu presiden.

Sementara, siapapun menteri atau pembantu presiden yang diangkat di sebuah negara demokrasi yang baru tumbuh, seperti Indonesia, pasti menghadapi resistensi walau sekuat, sepopuler dan seprofesional apa pun mereka.

Selain itu, janganlah kelak pemerintah menjadi bulan-bulanan di lembaga DPR, sebab pimpinan dan anggotanya dikuasai oleh kubu "kawan tanding berdemokrasi" yakni Koalisi Kebangsaan. Namun jangan pula terlalu takut sebab ada wasit ratusan juta rakyat yang adil menilai. Konstruksi berbangsa dan bernegara agaknya sudah pas benar jika semua diarahkan pada kebaikan, jangan mengedepankan syakwasangka dan *interest* sempit semata. Belum apa-apa janganlah serta-merta membenturkan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seolah-olah dirinya paling *legitimate* dibanding yang lain karena dipilih langsung oleh rakyat tanpa instrumen pembatas berupa partai politik. Sebab partai dibentuk sebagai pendiri negara demokrasi di sebuah negara yang demokratis. DPD ada karena DPR, DPR ada karena partai, partai ada karena rakyat..

Adalah lebih bijaksana jika semua instrumen dan institusi politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, lebih memberdayakan masyarakat dan swadaya masyarakat. Biarkan masyarakat tumbuh dan berkembang sendiri sesuai dengan kehendak dan janji-janji Presiden dan Wakil Presiden, yang memang sedang sesuai dengan kehendak rakyat yang terbukti dalam Pemilu.

Tugas pemerintah lebih ringan sebab hanya mengawasi dan mengarahkan rakyat semata. Sebab adalah mustahil jika semua persoalan bangsa bisa diselesaikan sendiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, para menteri, birokrasi, dan semua institusi resmi lainnya. Tugas pemerintah adalah lebih melayani. Karenanya, Pemerintah harus kuat agar bisa melayani rakyat tetapi harus seolah-olah tak ada, atau Pemerintah seolah-olah tak ada tapi terasakan kuat bentuk pelayanannya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden pertama pilihan langsung rakyat, Presiden RI ke-6, selamat mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. □ e-ti/**haposan tampubolon**



SYAMSUL MU'ARIF, WAWANCARA DENGAN TOKOH INDONESIA DOTCOM, PERLU DEPARTEMEN KOMINFO ■ e-ti/kominfo

SYAMSUL MU'ARIF

POLITISI NEGARAWAN DARI KALSEL

Hidup bersahaja dan mengalir laksana air. Baginya pedoman hidup adalah nurani dan akal sehat. Dia politisi yang tidak mau mengkhianati hati nurani hanya untuk mendapatkan sesuatu. Dia tidak ambisius! Kader Golkar yang menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kabinet Gotong-Royong, ini berobsesi jadi seorang negarawan. Putra bangsa asal Kalimantan Selatan ini selalu mengutamakan panggilan tugas dan tanggung jawab sesuai posisinya.

Lelaki bernama Syamsul Mu'arif, kelahiran Kandangan, 135 km dari Ibukota Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 8 Desember 1948, ini berprinsip tidak mengejar jabatan. Dia sendiri tidak tahu persis mengapa dibentuk seperti itu. Berkeinginan (ambisius) itu tidak boleh. Itu prinsip hidupnya. Tetapi kalau diberi tugas, dia selalu melaksanakan dengan baik, bahkan dengan mengorbankan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri.

Tatkala diangkat jadi menteri, dia mengutamakan pelaksanaan tugas kementeriannya daripada kepentingan keluarga, kepentingan

daerah asalnya dan kepentingan politik partainya. Dia seorang politisi profesional, negarawan, yang selalu berusaha melepaskan diri dari kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam mengemban tugas pemerintahan dan kenegaraan.

Di depan anak dan isteri, dia sedih ketika diangkat menjadi menteri. Menjadi anggota DPR saja sudah jarang makan bersama di rumah, apalagi jadi menteri! Dia meminta pengertian anak-isterinya. "Itu kesedihan saya yang pertama," katanya menggambarkan.

Begitu pula kepada sahabat dan konstituennya di Kalimantan Selatan, sebagai putra daerah dan kader Golkar yang diangkat menjadi

menteri, dia mengatakan tidak bisa lagi berpikir memprioritaskan Kalimantan saja, tetapi harus berpikir untuk Indonesia. Hal itu berbeda ketika ia duduk di legislatif, DPR, sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Selatan. Dia benar-benar berorientasi dan berkomunikasi pada konstituennya di Kalimantan Selatan. Maka dia menyebut hal ini sebagai kesedihan yang kedua.

Hal ini bukanlah sekadar retorika. Melainkan, itulah kenyataan hidupnya yang sesungguhnya. Bukan dibuat-buat atau dipaksakan, tapi benar-benar gaya hidup dan jalan hidupnya. Jalan hidup yang berpedoman pada

nurani dan akal sehat serta mengalir bagaikan air. Dia mengikuti filosofi air mengalir. "Saya ada di dalamnya, yang penting saya tidak tenggelam dalam arus, tapi mengikuti arus. Bersahaja, apa adanya," katanya menjelaskan.

Di situ pula dia menemukan jati diri dan kebahagiaannya. Baginya, kebahagiaan itu bukanlah kepuasan menerima atau karena mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan atau diinginkan. Tetapi kebahagiaan itu adalah kemampuan untuk menahan dan menghadapi penderitaan terpahit yang kita alami tanpa menggoncang dan merusak stabilitas diri. Jadi apa pun problem yang dihadapi, yang terpenting adalah tetap teguh berdiri pada prinsip yang dipegang.

Salah satu contoh ujian moral yang dihadapi oleh Syamsul adalah ketika ia menjadi wakil rakyat di DPR dalam kurun waktu 1987-2001. Dalam tahun-tahun ini terjadi peperangan batin yang sangat berat dihadapinya antara memilih mengkhianati hati nurani untuk mendapatkan sesuatu atau mengikuti hati nurani tetapi tidak mendapat apa-apa. Dia pun teguh mengikuti kata hatinya.

Keputusannya untuk mengikuti hati nurani itu jualah yang akhirnya membukakan jalan baginya menjadi seorang menteri. Baginya pedoman hidup itu adalah nurani dan akal sehat. Bila hidup dengan nurani dan akal sehat, ia yakin akan menemukan arti dan jalan hidup yang sebenarnya.

Meskipun ada beberapa yuniornya yang jauh lebih kaya darinya, Syamsul tidak menjadi iri dan tetap bersyukur, "Enak tidur saja sudah berkah yang luar biasa bagi saya," katanya.

Untuk menggambarkan perjuangan politiknya, Syamsul memberikan ilustrasi seperti seorang miskin yang tidak mempunyai apa-apa melihat mahasiswa cantik dan ingin

mendapatkan wanita itu. Si miskin ini diperhadapkan pada dua pilihan, frustrasi atau semakin termotivasi untuk berusaha lebih baik.

Ia sendiri memilih termotivasi berusaha lebih baik. Tekadnya itulah yang membawanya menjadi Ketua Umum Dewan Mahasiswa (Dema), yaitu memiliki si wanita cantik itu. Bahkan era roformasi akhirnya membuka jalan baginya. Ia diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi.

Ketika menerima tanggung jawab sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, mengira ruang

telekomunikasi, media, dan informatika. Ia pun prihatin melihat ketertinggalan Indonesia di bidang telematika. Dengan cepat dan cerdas dia mendalami bidang ini. Sehingga dalam tiga tahun, dia bersama timnya berpacu meletakkan *grand strategy* telematika di Indonesia. Maka, ia mempersiapkan kementerian ini menjadi departemen pada kabinet 2004.

Moral Politisi

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI yang sempat terpilih dua kali menjadi Ketua Pansus perubahan tata tertib dan menjadi anggota DPR terbaik pilihan wartawan, ini sering mengatakan bahwa seorang politisi harus memiliki moral dan etika di samping profesionalisme dalam melakukan tugasnya.

Keteguhan dalam mempertahankan prinsip diperolehnya dari pengalaman berorganisasi dan menjadi guru agama. Maka, tidaklah mengherankan bila kemudian ia dipercaya untuk menduduki jabatan Ketua Fraksi dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Ia menjelaskan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Partai Golkar di tahun 70-an membutuhkan kesabaran dan kekuatan mental yang dilandasi keyakinan bahwa visi politik yang diembannya harus terus dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan maupun kepada rakyat.

Keputusan itu sempat ditentang oleh rekan-rekannya di HMI. Walaupun begitu, ia tetap teguh pada keputusannya sembari berjanji bahwa ia akan berfungsi paling tidak sebagai rem seandainya kendaraan Golkar berjalan di luar jalur yang dapat merugikan umat. Dia pun mengimplementasikannya dengan teguh, walaupun

BIODATA:

Nama:

H. Syamsul Muarif BA

Lahir:

Kandangan, Kalimantan Selatan, 8 Desember 1948

Isteri:

Siti Zubaidah

Anak:

Fadhillah Akbar (S2)

Farid Al Ma'arif (S2)

Ida Zuraida (S2)

Fajar Muttaqien (S1)

Fauzie Al Hamidy (mahasiswa)

Fitri Rahmiyani (SMP)

Ayah:

H. Mandar

Ibu:

Siti Wasnah

Organisasi/Karir

Ketua HMI Cabang Kandangan

Ketua Pengurus Daerah PII Kabupaten

Kandangan

Ketua Umum Dema IAIN Antasari Banjarmasin

(1975-1977)

Ketua Umum Badko HMI Kalimantan (1977-1979)

Ketua KNPI Kalimantan Selatan (1982-1985)

Ketua AMPI Kalimantan Selatan (1985-1989)

Anggota DPRD (1982-1987)

Anggota DPR (1987-2001)

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI (1999-2001)

Wakil Sekjen DPP Golkar (1998-2004)

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (2000-2004)

Alamat Kantor:

Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat

Telp (021) 3844227

sarat dengan peperangan batin yang sangat berat. Kala itu, sebelum reformasi, sering kali dia dihadapkan antara memilih mengkhianati hati nurani untuk mendapatkan sesuatu atau mengikuti hati nurani tetapi tidak mendapat apa-apa. Dan, dia memilih hati nurani, moral dan etika.

Guru Agama

Keteguhan moral telah terasah dari masa kecil dalam pengasuhan orang tuanya. Dia diasuh untuk menjadi seorang yang taat beragama. Semasa di kampung, ia bersama keluarganya terpaksa pindah ke kota Kandangan karena terjadi pemberontakan Ibnu Hajar. Ayahnya yang berprofesi sebagai guru terpaksa pulang-balik dari Kandangan ke desa Batang Kulur. Setelah keadaan aman, orang tuanya akhirnya tinggal di desa itu.

Semenjak kelas 3 SD, Syamsul bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah, sering disebut Sekolah Arab, yang khusus mengajarkan agama. Dengan bekal inilah, Syamsul memilih masuk pendidikan guru agama setelah lulus dari sekolah dasar. Ia tinggal di Rantau bersama kakaknya sambil bolak-balik ke kampung. Biasanya setiap seminggu sekali ia pulang ke kampung, namun sesudah kelas 4 PGAN, hampir setiap hari dia pulang dengan bersepeda yang menempuh jarak sekitar 15-16 Km.

Ia kemudian memutuskan untuk mengikuti sekolah berikatan dinas lalu dilanjutkan di Banjarmasin selama dua tahun. Selanjutnya ia kembali ke desa dan mengajar di sana. Sebagai guru, Syamsul mulai mengukir beberapa prestasi yang kurang lazim di jamannya. Saat menjadi guru agama di Madrasah Ibtidaiyah yang mengikuti PGA 6 tahun, ia sudah mendapat pangkat golongan IIa sedangkan rekan-rekannya sesama pegawai negeri yang mengikuti UGA masih berpangkat golongan I. Jadi paling tidak secara administratif, Syamsul sudah lebih unggul daripada yang lain.

Satu tahun kemudian, ia ikut mendirikan Madrasah Tsanawiyah yang langsung dinegerikan. Pekerjaannya sebagai guru selama 5 tahun di desa itu ditekuninya sembari kuliah. Kalau pagi ia

A portrait of Syamsul Mu'arif, a middle-aged man with short grey hair and glasses, smiling warmly. He is wearing a dark batik shirt with a white and yellow floral pattern. The background is a wooden wall with a framed picture.

**Selalu Utamakan
Panggilan Tugas**

mengajar, sorenya ia kuliah di Kandangan.

Dewan Mahasiswa

Tahun 1967, ia melanjutkan studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kandangan, mendapatkan gelar Sarjana Mudanya (BA) di IAIN Antasari. Semasa kuliah waktunya banyak disisihkan untuk kegiatan keorganisasian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Di kalangan mahasiswa ia dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 1975-1977. Di tahun-tahun ini pulalah, Dema sedang mengalami masa keemasan di mana peranan Ketua Umum Dewan Mahasiswa (Dema) bisa populer menandingi rektor.

Namun, kenyataan lain yang harus diterimanya adalah ia tidak menyelesaikan skripsinya walaupun semua mata kuliah sudah diambilnya. Meskipun demikian, ia sempat membantu beberapa temannya membuat skripsi di mana waktu itu ia sedang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa yang selalu mendapat ranking sepuluh besar selama mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan latihan.

Sukses memimpin Dema, kemampuan kepemimpinannya kembali diasah saat menjadi Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Kalimantan pada tahun 1977-1979. Di tahun-tahun inilah, ia sempat diajak Golkar untuk bergabung namun ditolak karena ia belum berkehendak untuk terjun di dunia politik praktis.

Masuk Golkar

Baru pada awal tahun 80-an, Syamsul tidak mempunyai alasan lagi untuk menolak ikut dalam politik praktis. Dia memilih masuk Golkar. Ia berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang jahat permanen dan tidak ada sesuatu yang baik permanen. Di Golkar ia merasa bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dengan masuk di Biro Pemuda Mahasiswa dan Cendekiawan.

Pada Pemilu tahun 1982, ia terpilih menjadi wakil rakyat di



SYAMSUL MU'ARIF, POLITISI MESTI MILIKI MORAL DAN ETIKA ■ e-ti/ys

DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan pada usia 33 tahun, bersamaan dengan aktivitasnya sebagai Ketua KNPI Kalsel (1982-1985), dan Ketua AMPI Kalimantan Selatan (1985-1989). Hingga tahun 1987, Syamsul tetap menjadi anggota DPRD yang termuda.

Karir politiknya terus menanjak, ia ditarik ke DPR Pusat, padahal waktu itu, ia merasa harus lebih lama mengabdikan di daerah. Nasib baik itu muncul ketika tahun 1987, Ketua Umum Golkar H. Soedharmono mengeluarkan kebijakan yang menghendaki kader Golkar di legislatif pusat 20% di antaranya diisi oleh generasi muda. Beruntung baginya karena di DPRD tempatnya berada hanya ia satu-satunya yang berusia di bawah 40

tahun.

Semasa menjabat sebagai anggota DPR tahun 1987-2001, Syamsul merasa tidak bisa menjadi orang Jakarta baik di rumah maupun di pergaulan politik. Ia melihat kenyataan bahwa bila ingin menjadi orang Jakarta di jaman Orde Baru harus bisa mendekati orang-orang yang dekat dengan kekuasaan entah itu lewat koneksi atau uang.

Syamsul tidak memiliki semuanya itu. Modal politik yang ia miliki adalah kemampuan berorganisasi, kemampuan menulis dan kemampuan berbicara. Itulah sebabnya dalam kurun waktu 12 tahun, kedudukan paling tinggi yang pernah diraihinya adalah sebagai Sekretaris Fraksi. Dia juga

mengenang bagaimana beberapa rekannya setelah membaca naskah pidato buaatannya diangkat menjadi menteri. Selama masih berada dalam tatanan Orde Baru, boleh dikatakan ia termasuk kelompok minoritas kritis yang sering tidak dihargai pendapatnya.

Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena Golkar mereformasi diri dan menamakan diri Partai Golkar pada tahun 1998. Pada tahun 1999, Syamsul mendapat suara terbanyak dari 3 nama yang dipilih untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI.

Namanya makin mencuat di pentas perpolitikan nasional tatkala sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, ia ikut mengaggas ide pembentukan lintas fraksi DPR untuk memperingatkan Presiden KH Abdurrahman Wahid agar mau segera memperbaiki manajemen pemerintahan. Awalnya, tidak ada sama sekali niat menurunkan Presiden Gus Dur.

Namun Gus Dur yang pernah diduga terkait dengan kasus Bulog, ketika itu tetap saja mengabaikan peringatan (Memorandum I dan II) DPR itu. Bahkan Gus Dur membubarkan MPR/DPR lewat pemberlakuan dekrit. Kegoncangan politik berakhir dengan kejatuhan Gus Dur dan digantikan wakilnya, Megawati Soekarnoputri, Juli 2001. Syamsul Mu'arif pun dipercaya memimpin Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam Kabinet Gotong-Royong.

Teladan Keluarga

Jejak kariernya tak terlepas dari dukungan isteri dan anak-anaknya. Keluarganya sangat memahami prinsipnya sebagai seorang politisi dan menteri. Kesederhanaan hidup yang diasuhkan dalam keseharian keluarganya melalui keteladanan telah membuatnya tidak pernah dibebani oleh kepentingan keluarga dalam menjalankan tugas pengabdian, baik di legislatif maupun eksekutif.

Ketika pertama kali memboyong anak-isteri ke Jakarta tahun 1987, ia mengalami pengalaman, yang menurutnya, sangat menyedihkan dan berdampak kurang baik pada anak-anaknya. "Bayangkan saya

sampai menyuruh istri saya berhenti dari pegawai negeri," katanya. Waktu itu, istrinya, Siti Zubaidah, yang berprofesi sebagai guru hendak pindah mengajar di Jakarta. Surat permohonan pindah istrinya sudah dilengkapi. Istrinya mengurus lnsung kepindahan itu ke Dinas Pendidikan DKI. Setelah berkasnya masuk, besoknya orang Dinas Pendidikan DKI itu datang ke rumah, sore-sore: 'Ibu, kalau ingin beres ini, gampang saja, uang doank'. Petugas itu datang ke rumah meminta sejumlah uang. Dari kejadian inilah, anak-anaknya mengenal bahasa gaul Jakarta, "uang doank".

"Itulah kata-kata pertama yang dikenal anak saya tentang 'jahat'-nya Jakarta. Anak saya mendengar uang doang itu. Jadi saya bilang ke istri, 'kalau begitu sudahlah, nggak usah, ngurus anak-anak sajalah, daripada anak-anak kita nanti rusak'. Jadi istri saya cuti di luar tanggungan negara dan kemudian pensiun dipercepat. Dia ngurus anak, karena saya anak banyak, enam orang. Kalau saya lepas, siapa yang mengontrol anak-anak. Itulah, saya membangun rumah tangga," katanya.

Menurutnya, filosofi-filosofi seperti itu memang agak sulit kita kembangkan dalam dunia yang katakanlah zaman edan kalau kita pakai Ronggowarsito. Ia melihat kehidupan ini memang sudah begitu adanya, namun bila ia menggunakan cara itu (suap) agar istrinya bisa mengajar di Jakarta, Syamsul

maka ia meminta istrinya agar cuti bahkan kemudian pensiun dini.

Syamsul justru bersyukur, karena isterinya malah mengurus anak-anaknya hingga besar. Anak-anaknya berprestasi dengan tingkat pendidikan yang baik dan tetap menjadi 'orang kampung' meskipun tinggal di Jakarta. Tiga orang anaknya sudah meraih gelar S2. Keadaan keluarga seperti ini membuat dia sangat bahagia. Prinsipnya, ia harus menjadi pemimpin yang baik dan menjadi teladan di rumah baru kemudian di luar rumah. Ia dan keluarga juga selalu berusaha untuk hidup yang lurus-lurus saja. Prinsip inilah yang selalu dipegangnya.

Dia pun tak pernah mencarikan pekerjaan buat anak-anaknya. Demikian pula jika ada keluarga atau kerabat dan kenalan dari Kalimantan Selatan, yang meminta mencarikan pekerjaan, sulit ia layani. Sebab anak-anaknya sudah pasti akan merasa cemburu. Bahkan, untuk urusan sekolah anak-anak pun ia tak pernah meminta dan memberi selembur surat agar bisa diterima di perguruan tinggi tertentu. Namun nyatanya anak-anaknya yang dibimbing keras berdisiplin berotak encer dapat diterima kuliah di ITB Bandung dan UI Jakarta.

Bukan itu saja. Ia mengakui bahwa saat ini tidak memiliki bisnis atau perusahaan. Suatu kali ia pernah diajak berbisnis lalu diberi saham kosong. Namun, perusahaan itu akhirnya rugi dan ia harus turut

"Seorang politisi harus memiliki moral dan etika di samping profesionalisme dalam melakukan tugasnya"

khawatir anak-anaknya bisa terkontaminasi nantinya.

Saat itu, anak-anaknya mulai berpikir bahwa di Jakarta untuk memperoleh sesuatu harus dengan uang. Karena Syamsul melihat hal ini kurang baik dan merasa anak-anaknya perlu dididik lebih baik lagi

membantu agar bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban perusahaan itu. Ia merasa tidak memiliki bakat untuk berusaha. "Setiap kali saya dimasukkan ke dalam perusahaan, perusahaan itu jadi nggak bagus," katanya sambil tersenyum. Meskipun demikian, ia tetap

bersyukur karena tidak menjadi orang bisnis dan tidak mempunyai perusahaan. Ia hidup semata-mata dari politik (profesional) dan posisinya sebagai menteri membuatnya semakin bersyukur.

Sebelum menjadi menteri, Syamsul masih menyetir mobil sendiri. Ia dan isteri juga sepakat untuk tidak mengambil pembantu di rumah. Keenam anaknya diajarkan untuk membantu membereskan rumah, entah itu mengepel lantai dan mencuci mobil secara bergantian. Bila sholat Maghrib, ia menjadi Imam, dan bila ia tidak ada di rumah, anaknya yang menggantikan. Syamsul selalu berusaha agar budaya ini terus terpelihara di rumah.

Bahkan dalam kebersahaan hidup, posisinya sebagai menteri justru membuatnya merasa menderita. Ia tidak lagi menyetir sendiri, tidak bebas jalan-jalan setelah jam kerja, dan harus melalui prosedur protokol yang berbelit-belit. Dalam kaitan kebebasan pribadi ini, bila disuruh memilih antara menjadi anggota DPR atau menteri, Syamsul mengatakan lebih enak menjadi anggota DPR karena lebih bebas dalam berkreasi.

Maka tak heran bila ia pun tidak selalu patuh pada aturan protokol. Kadang kala dia jalan tanpa ajudan, dalam kota maupun ke luar kota. Di bandara, dia juga jarang duduk di ruang VIP (*very important person*) tapi tempat biasa. Sering kali di airport, orang Garuda heran karena dia tak didampingi ajudan. Dia paling dua-tiga kali pakai VIP di Bandara Soekarno Hatta. Dia memang terbiasa hidup yang biasa saja. Saat menumpang pesawat Garuda, misalnya, ia berbaur dengan penumpang biasa. Sering orang tanya, "Koq Bapak tidak di VIP?"

Tak Kejar Jabatan

Dia pun berprinsip dalam hidup tidak mengejar jabatan. "Saya tidak tahu mengapa saya dibentuk seperti itu. Berkeinginan itu tidak boleh. Itu prinsip hidup saya. Tetapi kalau saya diberi tugas, saya harus laksanakan dengan baik. Semampu saya," katanya.

Itulah yang dilakoninya sejak masih berkiprah di daerah hingga menjadi menteri. Saat akhir jabatan



SYAMSUL MU'ARIF, DIAWALI KETELADANAN ■ e-ti/kominfo

sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kabinet Gotong-Royong pun, dia tak berupaya mendekati calon presiden terpilih, sebagaimana lazimnya dilakukan banyak orang. Dia mengikuti seperti air mengalir. "Saya dibawa ke mana, di mana nyangkutnya, saya akan terima semua kenyataan itu. Termasuk pulang kampung atau tidak jadi apa-apa pun, itu sudah saya siapkan," ujarnya.

Kendati sesungguhnya saat ini, dia mempunyai tiga kemungkinan. Pertama, jadi menteri lagi, tapi partainya cenderung jadi oposisi. Kalau umpamanya betul-betul diminta, harus bersedia dipecah dari partai. Ini terjadi bulan Oktober.

Kedua, bulan Desember, Munas partai Golkar. Mungkin saja Partai Golkar membutuhkannya, walau bukan menjadi ketua umum. Ketiga, pulang ke Kalimantan Selatan, untuk pemilihan gubernur 2005.

Sebagai pemegang *share* dan portopolio terbesar dalam penyiapan cetak biru Departemen Telematika atau Departemen Telekomunikasi dan Informasi, sesuai orientasi kinerja, adalah layak jika nama Syamsul Mu'arif berada di urutan teratas calon menteri pertama di departemen itu. Namun karena peran oposisi permanen yang

digariskan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, ia harus tunduk pada kebijakan partai. Kalaupun ia bersikeras bersedia masuk dalam kabinet, jika diminta SBY-MJK misalnya, ia harus menghadapi konsekuensi paling buruk yakni keluar dari Partai Golkar.

Sebaliknya, kalau kerja kerasnya selama ini memimpin Kominfo ternyata kurang diapresiasi, memang akan memberikan keleluasaan dan ruang besar baginya untuk mengembangkan Partai Golkar agar dalam lima tahun ke depan tidak kehilangan kepercayaan dari rakyat pemilih. Momentum Munas Partai Golkar Desember 2004 adalah kesempatan besar bagi Syamsul Mu'arif untuk "balik kandang".

Bukan hanya itu dilema yang sedang dihadapinya. Partai Golkar Kalimantan Selatan memintanya pulang kampung untuk menjadi calon Gubernur Kalimantan Selatan. Walau sudah dan sedang menjabat menteri, dan tak pernah memiliki ambisi politik apa pun, Syamsul menyebutkan akan mau memenuhi panggilan pulang kampung asal disampaikan dengan tulus oleh masyarakat, dan karena memang ada *mission* besar yang harus dijawabnya.

Mission besar itu akhirnya terungkap sendiri. Dan adalah Syamsul Mu'arif sendiri yang menyaksikan langsung tayangan di sebuah stasiun televisi swasta, jam sebelas malam, tentang sebuah kabupaten baru bernama Tanah Bambu di Kalimantan Selatan yang *illegal minning* atau pertambangan liar batubara telah luar biasa merusak lingkungan paru-paru dunia di Kalimantan Selatan itu. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup Nabeli Makarim menyebutkan, dibutuhkan tak kurang Rp 3-4 triliun biaya reklamasi untuk mengembalikan lokasi penambangan liar batubara ke kondisi alamiahnya.

Saban malam hari truk-truk angkutan batubara berseliweran merusak separuh badan jalan,

Baginya, kebahagiaan itu bukanlah kepuasan menerima sesuatu yang dapat dicapai tetapi kemampuan untuk menghadapi penderitaan tanpa merusak stabilitas diri.

sedangkan sebaliknya tidak apa-apa sebab dilintasi truk bermuatan kosong. Saat ini pun, di Kalimantan Selatan ratusan sungai mulai mengering sebab tidak ada lagi air mengalir. "Kira-kira itu alasannya, pulang *dong* Pak, untuk memperbaiki keadaan ini. Kita perlu menyadarkan masyarakat bagaimana memperbaiki sungai itu tanpa merusak perekonomian rakyat," kata Syamsul Mu'arif, mengungkapkan kegundahan isi hatinya akan kampung halaman, menjelang pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan pertengahan 2005.

Maka dia bilang, kalau itu tujuannya, dia siap kalau memang masyarakat menghendaki. Tapi, katanya, minta ijin dulu *dong* melalui mekanisme partai. Dia secara pribadi, tidak menjadi soal apakah menjadi menteri, menjadi gubernur, atau tidak jadi apa-apa.

Kebetulan, pilihan-pilihan itu satu antara lain tidak bisa saling berhubungan. Umpamanya, kalau dia masuk ke kabinet, harus berhenti dari partai. Kalau jadi gubernur, tak bisa ikut DPP dan menteri. Ini yang harus dia pikirkan. "Tidak berarti saya harus menteri, tidak berarti saya harus jadi gubernur atau pengurus partai. Saya bisa saja ada di partai, tidak menjadi ketua umum partai tapi untuk menjaga supaya partai saya ini lima tahun ke depan

dihormati oleh rakyat karena menyelamatkan perjalanan republik. Saya ingin seperti itu," kata mantan guru agama ini.

Perubahan Leadership

Berkaitan dengan kinerja pejabat pemerintah, ia berpendapat bahwa di masa depan diperlukan orang-orang yang memiliki profesionalisme, background akademis, dan leadership. Sayangnya, ketiga hal ini sekarang masih terpisah.

Hal ini antara lain disebabkan kebijakan pendidikan. "Tahun 1977 ketika Dema dibekukan, mahasiswa dipersiapkan untuk masuk ke dalam *tekno structure* berbekal akademis dan itu menghasilkan akademisi, melahirkan ilmuwan-ilmuwan tetapi steril terhadap *leadership*," katanya dengan suara nyaring.

Syamsul menjelaskan bahwa Korea Selatan sama dengan Indonesia dalam hal tentara pernah berkuasa penuh (Orde Baru), namun berbeda dalam hal perlakuan terhadap aktivis kampus. Di Korea, para aktivis yang vokal dikirim belajar ke luar negeri seperti Amerika, Jepang dan Eropa. Di sana mereka magang kemudian kembali ke tanah air menjadi ahli yang mempunyai *leadership* dan idealisme, mempunyai rasa kebangsaan dan kehormatan diri.

Sementara, Indonesia hanya satu jurusan, keilmuan saja. Hanya sedikit aktivis Indonesia yang dikirim ke luar negeri seperti Syahrir, Hariman, dan sebagainya. Setelah Dema dibekukan, profesionalisme dan leadership menjadi terpisah. "Beginilah kondisi pemimpin Indonesia saat ini," katanya menjelaskan.

Di samping itu, ia melihat bahwa faktor politik yang kondusif juga merupakan hal yang sangat menentukan. Menurutnya reformasi adalah transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, supremasi hukum,



SYAMSUL MU'ARIF, LOYAL ■ e-ti/ys

penegakan HAM, lingkungan hidup dan reposisi TNI. Ia mempertanyakan apakah konsep tatanan politik jelas kesepakatannya.

"Kita melakukan *deconstruction* tetapi kita tidak memiliki konsep untuk *reconstruction*. Akibatnya yang terjadi adalah kita melakukan *trial and error* dalam penetapan UUD yang dalam empat tahun baru kita buat tetapi kita tidak puas kemudian kita buat dan susun lagi. Sejauh ini mengapa tidak ada perubahan. Mengapa korupsi yang kita perangi habis-habisan masih terus merajalela dibandingkan yang lain?" tanyanya lagi.

Syamsul mengatakan bahwa Indonesia melakukan reformasi di berbagai sektor kehidupan namun belum mempunyai konsep secara tuntas sehingga rekonstruksi dan reformasi mental - reformasi leadership belum terjadi. Kedua hal inilah yang membuat Indonesia belum bergerak.

Baginya, keputusan Korea untuk keluar dari program IMF lalu membayar semua utangnya, merupakan contoh yang perlu ditiru oleh Indonesia. Keberhasilan Korea dalam mengatasi kelesuan ekonomi didukung oleh agresivitas, leadership dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan Indonesia mungkin memiliki orang-orang yang profesional namun belum masuk ke kancha kepemimpinan yang bermoral.

Menanggapi tentang tidak adanya titik temu antara hidup religius dengan kehidupan sehari-hari yang menggerogoti bangsa ini, ia menjelaskan bahwa manusia Indonesia harus dididik dengan benar semenjak usia dini. Ia yakin bahwa kondisi psikologis pada masa pembuahan menentukan watak dan karakter anak di kemudian hari. Pembentukan karakter dan prinsip harus dimulai dari rumah tangga baru kemudian masyarakat dan pendidikan.

Ia mengatakan bahwa di Indonesia, pendidikan dan agama dibuat terpisah. "Bila orang mau beragama masuk sekolah agama, bila mau ahli masuk sekolah ilmu. Keadaan ini membangun manusia Indonesia yang tidak integrated. Padahal membangun manusia itu harus ada keseimbangan." katanya menambahkan. □ e-ti/crs-ht-mlp

Syamsul Mu'arif

Peletak Grand Strategy Telematika

Dalam tiga tahun memimpin Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Syamsul Mu'arif sudah dikenal luas berhasil meletakkan dasar-dasar atau *grand strategy* pengembangan telematika di Indonesia. Dia pun menggagas kementerian ini berubah dari kementerian negara menjadi departemen. Bukan untuk mengontrol media massa seperti zaman Orde Baru tetapi untuk lebih operasional mewujudkan *information society* dan *knowledge society*.

Politisi berjiwa kebangsaan ini menjelaskan, *background* kehadiran Kementerian Komunikasi dan Informasi itu adalah terjadinya peralihan dari sistem ketatanegaraan kita kepada tema yang lebih demokratis, yang lebih transparan, dan yang lebih akuntabel. Tema itu menghendaki kebebasan informasi harus dibuka agar sesuai dengan semangat demokratisasi. Namun, bersamaan keterbukaan bagaimana caranya agar pada sisi yang lain tidak terjadi deviasi informasi sehingga tidak menciptakan distorsi.

Lalu, bagaimana caranya agar

pemerintah dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik. Di berbagai negara rumusan demikian dilakukan dengan mendayagunakan teknologi baru yang disebut dengan ICT (*Information and Communication Technology*). Jika negara asing kebanyakan menggunakan nama Kementerian Informasi dan Komunikasi (Infokom), di Indonesia di balik menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

ICT memberikan jaminan tentang pelayanan informasi, sebab ICT itu sebetulnya berbentuk penyusunan database. Database ini bisa diakses oleh siapa saja, dalam



SYAMSUL MU'ARIF, BERJIWA KEBANGSAAN ■ e-ii/ys

konteks pelayanan informasi yang jauh lebih transparan ketimbang bicara. Sebab jika bicara mulut saja bisa berbohong. "Umpamanya memberitakan tentang sebuah peristiwa, karena pemberitaan itu tergantung sudut pandang. Kira-kira itu hakekatnya, ya, dari Kementerian Komunikasi dan Informasi," kata Mu'arif.

Sesuai dengan semangat demokratisasi dan keterbukaan, Syamsul menyebutkan Kementerian Kominfo tidaklah dimaksudkan untuk menghidupkan kembali Departemen Penerangan, seperti melakukan kontrol terhadap media. Namun, adalah juga salah jika Kominfo tidak perlu mengambil peran apapun seperti terjadi sebelum ada Kementerian Kominfo. Sehingga semuanya perlu diatur melalui Undang-Undang (UU).

Dia menunjuk Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. UU ini antara lain mengatur bahwa pemerintah tidak bisa campur dalam soal pemberitaan. Ancamannya adalah pidana penjara dua tahun atau denda. Walaupun kebebasan yang sudah bebas sekali ini, pada akhirnya sudah dianggap berlebihan oleh masyarakat. Sebab implikasinya antara lain memunculkan beragam tanyangan pornografi, hantu, mistik, kekerasan, dan lain-lain yang muncul sehari-hari di media cetak dan elektronik.

Oleh sebab itu masyarakat menuntut diperlukan adanya pembatasan-pembatasan, yang, menurut UU penegakannya

dilakukan oleh lembaga independen *Media Watch*. Artinya, pembatasan bukan lagi oleh pemerintah melainkan oleh masyarakat. Keberatan terhadap pemberitaan pers dapat disampaikan melalui Dewan Pers. Di bidang penyiaran tersedia UU No. 32 tahun 2002, yang fungsi pengawasan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Syamsul menegaskan, kehadiran pemerintah dalam Kominfo sama sekali tidak lagi dimaksudkan untuk mengontrol media massa cetak dan elektronik, sekalipun masyarakat tetap meminta Pemerintah agar menindak koran atau televisi yang kebablasan. Terbukti, pihaknya selama tiga tahun ini tidak ada satu surat pun memberikan penegoran kepada media. Walaupun pihaknya dimarahi oleh masyarakat, dianggap membiarkan saja. "Jadi, seolah-olah kita tidak memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Syamsul Mu'arif, menggambarkan betapa posisi Pemerintah begitu dilematis antara menjunjung tinggi kebebasan dan

demokratisasi, namun di sisi lain harus pula mendengar isi hati rakyat yang paling dalam. (*Selengkapnya baca: Wawancara Syamsul Mu'arif*).

Syamsul kemudian memperlengkapi iklim kebebasan dengan memberikan masyarakat sebuah jaminan baru lain, yakni sebuah Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi. UU ini, masih dalam konteks untuk memenuhi tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi yang dicerminkan oleh isi UU ini. Dalam undang-undang ini ditegaskan setiap pejabat publik harus mengerti masalah yang dia tangani. Pejabat publik wajib menyampaikan kepada masyarakat apabila dia mempunyai informasi yang seyogyanya memang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau dia tidak menyampaikan kepada masyarakat sesuatu yang menjadi hak masyarakat untuk tahu, kepada pejabat publik bisa dikenakan tindak pidana.

Dijelaskan, Kementerian Komunikasi dan Informasi

merupakan salah satu Kementerian dalam Kabinet Gotong Royong yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001, yang mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Komunikasi dan Informasi Nasional.

Sedangkan fungsinya adalah merumuskan mengoordinasikan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi termasuk telematika dan penyiaran. Juga mengoordinasikan dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang komunikasi dan informasi termasuk telematika dan penyiaran, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

Untuk mencapai



SYAMSUL MU'ARIF, SUARA AKTIVIS ■ e-ti/kominfo

tugas dan fungsi tersebut, Syamsul selaku Menkominfo menetapkan visi Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu "Terwujudnya masyarakat berbudaya informasi menuju bangsa yang mandiri, demokratis dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Departemen Kominfo

Ia mengatakan bahwa karakter dari teknologi informasi adalah jiwa transparansi. Karakter ini harus dipahami secara politis dan strategis. Oleh karena itu, di kementerian ini ia mengambil banyak orang dari Tim Koordinasi Telematika. Sementara orang-orang Deppen berada lebih banyak di Lembaga Informasi Nasional. Di kementerian ini ia memiliki orang-orang pintar yang berasal dari Bappenas, ITB, BPPT dan Telkom.

Keinginannya untuk mengikuti jejak Malaysia dan Korea Selatan yang berhasil karena mempunyai IT solution yang handal, menumbuhkan suatu ide agar komunikasi dan informasi bisa menjadi departemen. Bukan hanya sekedar Kementerian Negara yang beranggaran kecil sehingga tidak operasional dalam mengimplementasikan TI dan *e-government* yang notabene adalah pekerjaan yang besar.

Oleh karena itu, ia berharap mulai tahun 2004, komunikasi dan informasi menjadi departemen yang mencakup bidang tugas telematika. Jadi bidang telekomunikasi juga masuk di dalamnya. Selaku Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dia telah melakukan upaya dalam bentuk kajian kelembagaan komunikasi dan informasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan LAN, yang hasilnya telah disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.

Secara konsepsional hal ini sudah dibicarakan dengan berbagai instansi terkait. Terutama kepada Menteri Perhubungan. Menurutnya, Menteri Perhubungan setuju bidang telekomunikasi masuk dalam Departemen Komunikasi dan Informasi. Sehingga siapa pun yang akan menjadi presiden pada tahun

2004 akan dititipkan konsep ini dalam memori tugas.

Hal ini juga sangat diketahui betul oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono yang dahulu Menko Polkam, dan Muhammad Jusuf Kalla dahulu Menko Kesra. Mengingat mereka adalah merupakan *inner circle* atau lingkaran dalam pada Kabinet Gotong-Royong.

Bahkan ketika Agustus 2001 Syamsul berkordinasi dengan Menko Polkam, SBY menugaskan untuk pergi mempelajari pengembangan Multimedia Supercorridor ke Malaysia. Keseriusan menjadikan departemen itu juga telah terakomodasi pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara, yang salah satu rumusannya adalah menempatkan Departemen Telekomunikasi dan Informasi sebagai kementerian portofolio. Artinya, departemen ini harus ada dalam kabinet dan kalau presiden berkehendak membubarkan harus atas persetujuan DPR melalui pembahasan Undang-undang.

Selain itu DPR RI mendukung upaya-upaya Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengintegrasikan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi yang selama ini ditangani oleh instansi yang berbeda (Ditjen Postel dan Lembaga Informasi Nasional). Untuk ke depan fungsi-fungsi tersebut seharusnya ditangani secara terintegrasi oleh kementerian yang memiliki kewenangan utuh. DPR RI (Pansus RUU Kementerian Negara DPR RI) mendukung sepenuhnya untuk dilakukannya penggabungan fungsi tersebut dan telah memasukkan nomenklatur Kementerian Negara Telekomunikasi



SYAMSUL MU'ARIF, TINGKATKAN PERANAN MEDIA ■ e-ti/kominfo

dan Informasi di dalam RUU tentang Kementerian Negara.

Syamsul merasa optimis bahwa terbentuknya departemen yang akan menangani teknologi informasi secara kelembagaan akan didukung oleh berbagai pihak yang ingin agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara lain. Karena di Asia Tenggara saja, Indonesia berada di bawah Vietnam baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang teknologi informasi.

Indonesia Model

Selain persoalan tututan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas, secara eksternal Syamsul menyebutkan tahun 2015 di seluruh negara sudah harus terbentuk *information society*. Dan, lewat tahun 2015 sudah harus memasuki *knowledge society*. *Knowledge society* adalah tujuan Unesco, sedangkan *information society* itu adalah tujuan yang digagas oleh ITU (*International Telecommunication Union*). Dua-duanya, Unesco dan ITU adalah

badan PBB sehingga Indonesia terikat dengannya.

"Oleh sebab itu *nonsense* kalau kita membentuk kementerian untuk mengurus, membelenggu, membendung informasi, mengawasi pers, atau mengganggu kebebasan pers. Itu sudah masa lalu, bukan itu arahnya. Tapi, untuk menuju *information society*, dan *knowledge society*, itulah yang menjadi arahan," tegas Syamsul Mu'arif menjelaskan posisi strategis Kementerian Kominfo.

Syamsul Mu'arif mencatat Indonesia memerlukan minimal enam UU bidang Telematika. Yakni, UU tentang Pers, UU Penyiaran, UU Kebebasan Informasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perfilman, dan UU Telekomunikasi.

Kalau keenam UU tersebut terintegrasi dengan baik dan ditangani dalam satu Departemen, Syamsul yakin betul itulah langkah yang paling strategis bagi Pemerintahan baru, setelah dipilih oleh rakyat untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.

Sebagaimana perhitungan PBB, pertumbuhan satu persen komunikasi dan informasi akan menciptakan tiga persen pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab, kata Syamsul, Indonesia harus mengembangkan sebuah kebijakan penyebaran informasi secara lebih baik. Apakah itu melalui telepon, televisi, radio, koran, maupun melalui internet dan film secara terintegrasi, komprehensif, terpadu dan mengarah. "Kira-kira, ke depannya harus seperti itu," simpulnya.

Kebutuhan Kementerian Kominfo menjadi departemen seiring pula dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia jumlah penduduknya, dan negara demokratis ketiga setelah Amerika Serikat dan India, bahkan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

"Nah, oleh sebab itu kita adalah sebagai model perkembangan dari negara yang sebelumnya berkembang, menuju negara yang lebih maju dalam *information society*. Makanya, sistem yang akan kita bangun bersama *after* pemerintahan baru itu sangat menentukan," kata Syamsul.

Empat Kelemahan

Menurutnya, ada empat (atau lima) kelemahan Indonesia di bidang telematika, yaitu undang-undang, infrastruktur, SDM, dan budget, serta (kelima) budaya. Pertama, Undang-undang. Indonesia belum memiliki undang-undang yang disebut *cyberlaw*. Di mata dunia, Indonesia termasuk tiga besar dalam hal kejahatan membajak kartu kredit. Akibatnya banyak transaksi pembelian melalui kartu kredit yang dilakukan dari Indonesia dicurigai dan ditolak. Sebagai contoh, di sebuah kantor pos di Yogya tertimbun berbagai kiriman yang tidak diketahui siapa pembelinya.

Kedua, infrastruktur. Penggunaan internet di Indonesia masih lambat karena belum adanya *superhighway*, dimana yang ada selama ini hanya jalan tikus yang kebanyakan infrastrukturnya dibangun sendiri-sendiri oleh departemen dan pengusaha. "Kita seharusnya membangun jalan rayanya, namun tidak dikerjakan karena tidak ada yang menangani. IT mulai ditangani sejak kementerian ini ada. Jadi selama ini jalan sendiri," katanya menjelaskan.

Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan apa yang disebut dengan PLC (Power Line Circuit), yang memungkinkan 35 juta orang di Indonesia bisa menggunakan internet lewat jaringan kabel listrik.

Ketiga SDM. Kondisi SDM Indonesia sangat memprihatinkan. Pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya dalam bidang e-government dengan melakukan *outsourcing* agar tidak ditangani oleh pegawai negeri yang tidak mengerti. Untuk itu dilakukan pelatihan Teknologi Informasi di kantor Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi.

Keempat, anggaran/budget. Maklum, satu tahun pertama tugasnya sebagai Menteri ia gunakan untuk membangun institusi baru. Anggaran pembangunan yang ia miliki pun begitu minim, tahun 2002 hanya Rp 5 miliar, tahun 2003 meningkat menjadi Rp 40-an miliar, tahun 2004 ada lebih lagi.

Lalu yang kelima, budayanya.

Budaya kita masih sangat paternalistik, masih sangat tradisional sehingga belum terbiasa dengan pengembangan ini. Kelima aspek inilah hambatan yang kita hadapi.

Sementara mengenai peta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Syamsul mengungkapkan Indonesia berada pada posisi 73 dari 102 negara berkembang untuk Indeks Kesiapan Jaringan (*Networked Readiness Index*).

Menurutnya, telematika harus terus diupayakan untuk dijadikan salah satu tulang punggung pembangunan. Indonesia memiliki banyak potensi dalam mewujudkan hal tersebut. Perkembangan sektor industri telematika dalam kurun waktu dari tahun 2001 sampai dengan prediksi tahun 2007, diharapkan terjadi peningkatan.

Pada tahun 2001, total *revenue* yang didapatkan Indonesia untuk industri telematika mencapai 903 juta US dollar, dengan prosentase GDP 0,6 %, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang IT 5.023 perusahaan yang menyerap tenaga kerja 113.017 orang. Untuk tahun 2007 diprediksi, *revenue* akan mencapai 1.720 juta US dollar, dengan prosentase GDP 0,7 %, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang IT 7.141 perusahaan dan mampu memperkerjakan 164.250 karyawan.

Bila menurut survey internasional, pemanfaatan telematika di negara berkembang (40 % dari total negara berkembang) hanya digunakan sebatas pada aplikasi perkantoran, dan untuk berkomunikasi dalam bentuk e-mail.

Maka dengan melihat peranan telematika seperti yang telah disebutkan di atas tadi, seyogyanya telematika di Indonesia lebih dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara lebih jauh. Dia berharap, kiranya hal tersebut akan mampu menempatkan Indonesia minimal setara dengan negara lain, dalam mengadopsi kesepakatan-kesepakatan internasional guna mencapai hasil pertemuan *World Summit on Information Society* (WSIS) yang diselenggarakan Desember 2003 yang lalu di Jenewa. □ e-tl/crs-ht-mlp

Langkah Indonesia Men

Wawancara Syamsul Mu'arif, Meneg Kominfo

Indonesia sangat tertinggal dalam hal telematika. Padahal sebagaimana dicanangkan ITU dan UNESCO, dunia sedang berlomba menuju tahun 2015 terbentuknya *information society* dan *knowledge society*. Syamsul Mu'arif pun membangunkan mimpi Indonesia menuju masyarakat informasi itu. Walaupun hal itu disadari sangat berat, tetapi harus dimulai.



SYAMSUL MU'ARIF, RUMUSKAN GRAND TRATEGY TELEMATIKA ■ e-li/atur



pa saja langkah yang seharusnya dilakukan Indonesia menuju *information society* dan *knowledge society* itu? Apa kendala dan kelemahan Indonesia dalam hal ini? Apa yang sudah dilakukannya selama tiga

tahun memimpin Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi? Ternyata, dia telah meletakkan dasar-dasar atau *grand strategy* telematika di negeri ini. Sehubungan dengan itu, kementeriannya pun telah menyiapkan memori serah terima yang akan

Menuju *Information Society*

dipublikasikan setelah diserahkan kepada menteri baru

Dia berharap, *grand strategy* dalam bidang komunikasi dan informasi itu pada tahun 2005 akan dibawa ke dalam sidang WSIS (*World Summit on Information Society*), di Tunisia, untuk dipersandingkan dengan yang lain-lain di dunia.

Sudah dua kali TokohIndonesia DotCom mewawancarai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi ini. Pertama pada 8 Mei 2003 dan kedua pada 24 September 2004. Pada kesempatan pertama, dia sudah mengungkapkan bagaimana timnya merumuskan dasar-dasar pembangunan telematika di Indonesia dan berharap yang menanganinya kelak bukan lagi institusi kementerian negara tetapi sebuah departemen.

Pada wawancara kedua, hal itu dipertajam dan diperluas lagi. Dia berbicara terbuka, apa adanya, tanpa beban dan tidak ambisius. Selain itu, dia juga berbicara tentang kemungkinan pilihannya setelah berakhirnya masa tugas Kabinet Gotong-Royong. Bisa saja dia tetap jadi menteri, atau kembali aktif di Partai Golkar, atau memenuhi permintaan masyarakat menjadi calon gubernur Kalimantan Selatan, atau tidak menjadi apa-apa. Dia mengaku tidak dalam posisi memilih. Prinsip hidupnya menerima apa adanya, mengalir laksana air.

Berikut petikan wawancara TokohIndonesia DotCom dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, di ruang tamu kantornya Jalan Medan



SYAMSUL MU'ARIF BERI PENJELASAN KEPADA M. JUSUF KALLA ■ e-ti/mlp

Merdeka Barat (24/9/04). Dia didampingi stafnya Aizirman Djusan, MSc. Econ, Kepala Biro Data, Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

MTI: Kementerian Komunikasi dan Informasi ini adalah sesuatu yang baru, walaupun dulunya kelanjutan dari Departemen Penerangan. Kita tahu, bahwa Anda punya visi jauh ke depan untuk mempersiapkan kementerian ini menjadi semacam Departemen Telematika. Kita ingin tahu, kinerja kementerian ini selama tiga tahun terakhir di bawah kepemimpinan Anda?

SM: *Background* dari kementerian komunikasi dan

Adalah salah kalau orang berpikir kementerian ini ingin menghidupkan kembali Departemen Penerangan, mengontrol media. Jelas bukan itu maksudnya.

informasi ini adalah terjadinya peralihan dari sistem ketatanegaraan kita dengan tema yang demokratis, yang transparan, yang lebih akuntabel. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi sesuai dengan kondisi berikutnya. Nah, tema itu menghendaki bagaimana di satu sisi

kebebasan informasi dibuka karena itu semangat demokratisasi, keterbukaan dibuka, tetapi pada sisi yang lain tidak terjadi deviasi dari informasi ini sehingga menciptakan distorsi.

Nah, lalu bagaimana caranya pemerintah tanpa pola aktivitas yang tinggi tetapi dapat memberikan

pelayanan informasi kepada publik. Itulah rumusan, yang di berbagai negara-negara lain diterapkan dengan pendayagunaan teknologi yang disebut dengan ICT (*Information and Communication Technology*). Makanya di luar kebanyakan itu disebut Kementerian Informasi dan Komunikasi. Di kita dibalik saja Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

ICT itu memberikan jaminan tentang pelayanan informasi, karena ICT itu sebetulnya penyusunan data. Database isinya tentu adalah informasi yang bisa diakses oleh siapa saja dalam konteks pelayanan informasi yang jauh lebih transparan ketimbang daripada sekadar bicara. Karena bicara bisa bohong. Umpamanya memberitakan tentang sebuah peristiwa, karena pemberitaan itu tergantung sudut pandang. Kira-kira itu hakekatnya Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Jadi, adalah salah kalau orang berfikir ini ingin menghidupkan Departemen Penerangan kembali, mengontrol media. Jelas bukan itu maksudnya. Tetapi adalah juga tidak betul kalau umpamanya kita berfikir bahwa Kementerian Kominfo ini tidak perlu mengambil peranan apapun, seperti yang terjadi sebelum Kementerian Kominfo ini ada. Peranan itu diatur dalam undang-undang.

Nah, yang bergerak di bidang Komunikasi dan Informasi itu undang-undang adalah Undang-undang Pers, UU No. 40 Tahun 1999. UU ini sudah kita punya sebelum kementerian ini ada. Dalam UU ini diatur bahwa pemerintah tidak bisa campur dalam soal pemberitaan. Karena kalau campur tangan diancam pidana penjara dua tahun atau denda. Jadi ini sudah bebas sekali.



SYAMSUL MU'ARIF BUKAN UNTUK MENGONTROL MEDIA ■ e-ti/mlp

Nah, kebebasan inilah yang dianggap berlebihan oleh masyarakat karena implikasi kebebasan ini melahirkan pornografi, hantu, mistik dan kekerasan menjadi tayangan sehari-hari, baik media cetak maupun elektronik. Oleh sebab itu, diperlukan ada pembatasan-pembatasan.

Pembatasan-pembatasan dalam undang-undang itu sudah ada sebetulnya tetapi tidak ditegakkan karena tidak ada yang menegakkan. Dulu yang menegakkan adalah pemerintah, kontrol oleh pemerintah. Sekarang siapa yang menegakkan? Menurut undang-undang itu adalah Media Watch. Artinya apa, masyarakat itu sendiri yang melakukan pengawasan. Nah, Media Watch boleh melakukan segala sesuatu melalui Dewan Pers, kalau ia keberatan terhadap pemberitaan pers. Tetapi budaya kita belum terbiasa untuk seperti itu.

Kemudian dalam bidang *broadcasting*, penyiaran, sudah ada Undang-undang No. 32 Tahun 2002 (Desember 2002). Dalam UU

ini, kekerasan dan pornografi itu juga dilarang. Tapi dalam konteks ini, Media Watch atau masyarakat itu sendiri ke mana larinya? Larinya adalah ke Komisi Penyiaran Indonesia.

Bukan Mengontrol

Oleh sebab itu, saya ingin tegaskan kehadiran pemerintah dalam komunikasi dan informasi sama sekali bukan untuk tujuan mengontrol. Tetapi di sisi lain, masyarakat tetap meminta pemerintah untuk menindak koran dan televisi yang memberitakan dan menyangkan kekerasan dan pornografi.

Namun, kami selama tiga tahun ini, tidak ada satu surat pun memberikan penegoran kepada media itu. Tetapi kami dimarahi oleh masyarakat, lho kok ini pemerintah membiarkan saja. Jadi, seolah-olah kita tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Ini dilema yang kami hadapi.

Untuk melengkapi UU

Pers dan UU Penyiaran, maka kita ingin memberikan lagi ke masyarakat Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi. Dalam Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi ini, tercermin tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi.

Dalam undang-undang ini pejabat publik itu harus ngerti masalah yang dia tangani. Pejabat publik wajib menyampaikan kepada masyarakat apabila dia mempunyai informasi yang seyogyanya memang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau dia tidak menyampaikan kepada masyarakat sesuatu yang menjadi hak masyarakat untuk tahu, pejabat publik bahkan bisa dikenakan tindak pidana.

Jadi ini satu langkah terobosan yang maju supaya jangan ngawur. Jangan kebebasan itu menjadi ngawur, maka pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap pengembangan informasi. Seorang pejabat publik tidak boleh dengan mudahnya mengatakan ini

rahasia sehingga orang tidak boleh tahu. Dalam undang-undang ini diatur mana yang dikategorikan rahasia, mana yang dikategorikan wajib disampaikan kepada masyarakat, mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak.

Yang berikutnya, Undang-undang tentang teknologi informasi. Kami sedang menyusun draftnya yang nanti dibahas bersama DPR pada periode yang akan datang. Jadi, pemerintahan yang akan datang yang akan melakukan pembahasan.

UU ini sebagai tumpuan dari perkembangan bidang ICT. ICT ini merupakan susunan informasi dalam bentuk data, data disusun menjadi database. Database dapat dikelola sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat dikeluarkan dan dimanfaatkan. ICT ini termasuk di dalamnya transaksi uang melalui data internet. Nah, kalau sudah sampai ke situ berarti harus betul-betul *secure*, harus betul-betul aman.

Berdasarkan kebutuhan itulah maka, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, masih banyak lagi yang kita butuhkan. Nanti ada undang-undang tentang kejahatan elektronik. Kemudian, nanti ada banyak turunannya. Di Malaysia saja ada delapan undang-undang, kalau tidak salah, sudah dilahirkan dalam bidang teknologi informasi. Jadi kita agak ketinggalan.

Kalau landasan kebijakan undang-undang ini sudah ada maka dia akan menjadi landasan kebijakan untuk pengembangan kementerian ini.

Juga, sebetulnya ada lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu undang-undang tentang perfilman. Bahkan tadi baru keluar dari

ruangan ini BP2N, Badan Pertimbangan dan Pembinaan Perfilman Nasional. Mereka meminta agar nanti film itu juga ditangani dalam satu departemen, bukan oleh kementerian negara seperti sekarang di Budpar. Bahkan mereka menghendaki kalau bisa tetap gabung di Komunikasi dan Informasi, karena menurut mereka itu lebih kepada industri lebih kepada media daripada produk budaya. Kalau produk budaya dia tidak berorientasi komersial kadang-kadang, sementara film itu lebih berorientasi kepada pasar, itu kata mereka.

Kalau umpamanya itu ada pasti kita butuh undang-undang perfilman lagi yang memperbaiki keadaan yang ke depan nanti antara film, televisi, radio, telepon, internet itu akan menjadi konvergen, menjadi satu kesatuan yang terpadu, yang sekarang ini populer disebut istilahnya multimedia.

Satu hal yang perlu diketahui, bahwa dunia sudah menyiapkan untuk 2015, pembentukan masyarakat informasi, yang disebut dengan *information society*. Kemudian setelah 2015 nanti, kita menuju ke *knowledge society*. *Knowledge society* adalah tujuan Unesco, sedangkan *information society* itu adalah tujuan yang digagas oleh ITU, dua-duanya adalah badan PBB. Kita terikat dengan ini. Dunia semua akan menuju ke sana oleh sebab itu kita juga menuju ke sana.

Adalah *nonsense* kalau kita membentuk kementerian untuk mengurus membelenggu

dan membendung informasi, mengawasi pers umpamanya atau mengganggu kebebasan pers. Itu sudah masa lalu. Bukan itu arahnya. Tapi untuk menuju *information society* dan *knowledge society*.

Untuk itu, diperlukan UU tentang (1) pers, (2) penyiaran, (3) kebebasan memperoleh informasi, (4) informasi dan transaksi elektronik, (5) perfilman, (6) telekomunikasi. Kalau keenam bidang ini terintegrasi dengan baik dalam satu departemen,

komprehensif, terpadu dan mengarah. Kira-kira, ke depannya harus seperti itu.

Jadi kebutuhan akan departemen, *background*-nya seperti itu. Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia jumlah penduduknya, dan negara demokratis ketiga kalau kita melihat Amerika yang terbesar itu, kemudian India, yang berikutnya adalah Indonesia keempatnya karena Cina yang pertama (penduduknya terbesar) tapi Cina kan tidak dikategorikan demokratis.



JUSUF KALLA DAN SYAMSUL MU'ARIF, KADER GOLKAR ■ e-ti/ad

menurut saya itulah langkah yang paling strategis bagi pemerintahan baru setelah dipilih oleh rakyat ini untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.

Sebab, satu persen pertumbuhan komunikasi itu bergerak di masyarakat, akan menciptakan tiga persen pertumbuhan ekonomi. Hal ini sudah dihitung oleh PBB, dihitung oleh dunia. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan sebuah kebijakan penyebaran informasi secara lebih baik. Baik melalui telepon, televisi, radio, koran maupun melalui internet dan film secara terintegrasi,

Nah, oleh sebab itu kita akan menjadi model dari perkembangan dari negara yang sebelumnya sentralistis, berkembang menuju negara yang lebih maju dalam *information society*. Makanya sistem yang akan kita bangun bersama after Pemerintahan baru itu sangat menentukan.

MTI: Dan, Indonesia juga negara Islam terbesar di dunia?

SM: Ya! Tetapi kita orientasinya bukan negara Islam, kita negara kebangsaan. Penduduk muslim terbesar, iya, nomor satu di dunia penduduk

Muslim terbesar. Tetapi walaupun kita penduduk muslim terbesar kita sudah bersepakat untuk membangun sistem negara kebangsaan.

MTI: Kembali ke tadi, yang Anda jelaskan soal perlunya departemen menuju information society dan knowledge society, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan kementerian ini?

SM: Tadi saya katakan ada enam. Ini adalah perangkat kebijakan, kebijakan yang paling dasar adalah UU. Kalau UU ada kita bisa bergerak. Setelah UU ini ada maka kita memotret keadaan yang ada sekarang, yaitu kondisi, kemudian kita menyusun rencana.

Nah, potret kondisi itu apa? Potret kondisi kita adalah keteringgalan dan kesemrawutan. Tidak ada sistem yang terbentuk dari semua macam yang ini tadi. Jadi ini harus diperbarui, UU pun diperbarui. Kalau UU ini selesai nanti kita membangun sistem informasi dan komunikasi nasional.

Kementerian ini meletakkan grand strategy dalam bidang komunikasi dan informasi, yang dituangkan menjadi sistem informasi nasional. Sistem informasi nasional adalah sebuah langkah strategis kita ke depan secara terintegrasi menuju kehendak dunia *information society* dan *knowledge society*.

MTI: Apa kelemahan dan tantangan terberat yang dihadapi dalam upaya meletakkan dasar menuju information society dan knowledge society itu?

SM: Setidaknya ada empat kelemahan, kalau tidak disebut dengan lima kelemahan. Pertama UU tadi, berarti sistemnya belum

terbangun. Selama ini kita hanya membiarkan masyarakat sendiri membentuknya. Jadi umpamanya perbankan, sistem transaksi elektronik itu sekarang sudah jalan tetapi kita tidak lindungi dengan UU sehingga kejahatan dalam bidang transaksi elektronik tidak bisa dibawa ke pengadilan. Seperti *carding* itu, kejahatan menggunakan kartu orang lain, itu lepas dari beberapa pengadilan yang terjadi di Indonesia karena polisi tidak bisa tangkap.

Kedua, infrastruktur. Di Korea Selatan, seluruh wilayah sudah bisa akses internet dan sudah menjangkau 60 persen

tidak bisa akses internet.

Kita harapkan, tahun 2015 kita harus bisa mencapai 50 persen lebih dapat akses internet. Hal ini bisa tercapai kalau sistem dalam UU dan infrastruktur tadi dibangun.

Makanya dalam konteks ini untuk sekolah kita adakan program OSOL (*One School One Laboratorium Computer*), kira-kira 20 komputer untuk satu sekolah. Pengadaannya dibantu oleh para pengusaha dan Telkom membantu untuk internetnya. Membangun infrastruktur sekolah salah satu pilihan kita, selain juga *electronic government* (e-Government). Jadi kalau nggak ada infrastruktur e-

Pegawai kita, pegawai negeri kita banyak nggak ngerti teknologi informasi. Padahal dia harusnya mengelola sistem keuangan, sistem kepegawaian, sistem kependudukan, segala macam sistem itu dengan mendayagunakan database. Di satu sisi ada SDM kita yang pintar sekali sehingga menjadi *carding* yang hebat di Indonesia, kalau nggak nomor satu nomor dua kira-kira kejahatan elektronik. Ini kelemahan yang ketiga.

Kelemahan yang keempat, dana. Kita mengalami krisis. Pada tahun 2002, 40 persen dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah untuk bayar utang, cicilan dan



SYAMSUL MU'ARIF, BARU 4 PERSEN AKSES PENDUDUK UNTUK INTERNET ■ e-ti/ad

penduduk. Kita, baru empat persen akses penduduk untuk internet. Sebagai contoh, ada sekolah di Sulawesi Selatan, sekolah itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer tetapi tidak ada akses internet karena infrastrukturnya tidak cukup menunjang. Jadi, bagaimana bisa maju, manajemen komputer segala macam *information system* tetapi dia

Gov-nya nggak bisa jalan di daerah.

Contoh sederhananya adalah, IT-KPU. Kita mempunyai lebih 5.000 kecamatan dan 2.500 kecamatan belum bisa internet. Jadi bagaimana KPU harus sampai ke sana, terpaksa memakai sistem satelit. Satelit biasanya agak lebih mahal.

Kemudian, ketiga, sumberdaya manusia (SDM).

subsidy. Jadi bayangkan kalau mencapai 40 persen itu kita buang percuma. Sementara yang produktif, untuk perekonomian, untuk kesejahteraan masyarakat, terbatas. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kepercayaan investor dari asing. Nah, investor belum percaya dengan kondisi Indonesia yang seperti sekarang. Itu dilema yang dihadapi.

Nah, paling tidak ada

empat ini tadi. Lalu yang kelima, budayanya. Budaya kita masih sangat paternalistik, masih sangat tradisional sehingga belum terbiasa dengan pengembangan ini. Kelima aspek inilah hambatan yang kita hadapi.

Langkah Mengatasi

MTI: Lalu langkah-langkah mengatasinya bagaimana?

SM: Kita harus satu persatu. Bidang UU sudah mulai kita benahi. Di bidang infrastruktur, sekarang sudah ada kesepakatan dengan Korea Selatan untuk membangun yang namanya e-Indonesia. Kementerian ini tiga tahun usianya tetapi dua tahun kerjanya, karena satu tahun kan menyiapkan perangkat dari nol itu dulu. Dan dua tahun itu baru kita komitmen dengan Korea untuk e-Indonesia membangun infrastruktur sehingga seluruh Indonesia ini bisa terjangkau internet. Nah, ini akan diselenggarakan oleh pemerintah baru nanti.

Kemudian, untuk sumberdaya manusia, dimulai dari sekolah dengan program OSOL di samping kita melakukan pelatihan. Juga ada program yang terakhir dari ADOC (*APEC Development Opportunity Center*).

Namun, saya terus terang saja, sekarang ini belum ada yang start melaju, belum ada. Semuanya masih identifikasi masalah, kemudian langkah awal. Langkah awal ini akan segera bergerak di depan ini.

Dalam hal ini, yang paling berat adalah budaya birokrasi. Jadi ini yang harus kita lakukan proses perubahan dari birokrasi yang memerintah (karena namanya kan pemerintah), harus berubah menjadi



SYAMSUL MU'ARIF, DORONG PERTUMBUHAN INFORMASI ■ e-ti/ad

birokrasi yang melayani. Hal ini perubahan yang berat. Kalau biasanya pemerintah memberi pelayanan dapat amplop, berubah menjadi pelayanan tanpa amplop. Tetapi nanti amplopnya itu datang dalam bentuk

data ini akan sangat dibutuhkan, kita membangun sistem kependudukan dengan kekayaan dari penduduk itu. Kekayaan penduduk itu dikenakan pajak. Kalau administrasi penduduk dan administrasi

penyelenggaraannya. Kemudian untuk institusi dan kelembagaannya sudah ada Keppres No. 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Anggota TKTI itu bukan pemerintah semuanya, tapi ada unsur masyarakat dan dunia usaha. Komprehensif menggabung dari semua stakeholder.

Jadi, kalau mau katakan saya belum berbuat apa-apa, bahkan agak kecewa lambatnya kita melangkah ini.

Tapi semua perencanaan dalam konteks untuk tinggal start nanti dari pemerintahan baru, kami kira akan melaju apalagi kalau di-back up oleh presiden. Kita berharap pemerintahan baru nanti lebih mem-back up lagi perencanaan yang sudah diselesaikan dalam periode ini.

“Tinggal start nanti oleh pemerintahan baru, dan akan melaju apalagi kalau di-back up oleh presiden.”

kesejahteraan yang lebih baik buat pegawai negeri dan pelayanan yang lebih baik buat publik. Itu tujuan kita dan ini yang paling berat.

Menurut Bill Gates, sebuah negara bisa menerobos ini apabila kepala negaranya kuat. Kepala negaranya mempunyai kemauan politik yang kuat untuk menerapkan teknologi informasi. Barangkali yang kita anggap berhasil itu adalah Malaysia. Singapura-Malaysia itu kan strong government baru dia bisa menerapkan dengan benar.

Kemudian, Bill Gates juga mengatakan harus dimuali dari keuangan. Jadi sistem perpajakan, sistem pabeian. Karena apa, karena

kekayaannya baik maka pajaknya akan banyak masuk.

Nah, ini yang nanti akan mengangkat pendapatan nasional dan terjadi efisiensi pada pembelanjaan. Kenapa efisien pembelanjaan, karena kita melakukan apa yang disebut e-procurement, pelelangan secara elektronik. Pelelangan secara elektronik itu akan meredusir dari 20-30 persen daripada biaya yang biasa manual.

Jadi itu harapan, semuanya harapan. Walau, dari beberapa yang saya sampaikan sudah start semua. Umpamanya di *electronic government* sudah ada Inpres No. 3 Tahun 2003 untuk

MTI: Apakah pemerintah selama ini kurang back up?

SM: Ada kelemahan. Kelemahan selama ini adalah kami hanya boleh kebijakan, tidak boleh membangun proyek operasional. Karena apa, karena hanya menteri negara. Itu kelemahan, makanya tadi kita belajar dari keadaan. Nah kalau menteri negara itu hanya kebijakan. Kebijakan tanpa power, tanpa operasional, nggak jalan ke bawah.

Makanya banyak orang kecewa mengapa komunikasi nggak jalan lagi ke bawah, mestinya kan ada penyuluh Deppen di bawah itu. Itu kan hilang, dulu ada mobil unit penerangan, sekarang



SYAMSUL MU'ARIF, MASYARAKAT RISAUKAN PORNOGRAFI ■ e-ti/ad

Media Wattch boleh melakukan segala sesuatu melalui Dewan Pers, kalau ia keberatan terhadap pemberitaan pers. Tetapi budaya kita belum terbiasa untuk seperti itu.

kan *nggak* ada lagi. Karena mobil unit penerangan itu dengan begitu lancarnya untuk sampai ke desa-desa menyampaikan *face to face* tentang informasi. Mereka belum baca koran,

barangkali radio juga *nggak* punya, televisi *nggak* punya. Iya itu yang ditunggu oleh masyarakat. Tapi itu sudah *nggak* ada lagi. Nah, yang paling memberatkan sebetulnya adalah institusi

ini tidak cukup memiliki power untuk melakukan itu.

Apalagi kalau kita bicara anggaran. Tahun 2002 itu hanya dapat Rp 5 miliar, tahun 2003 baru dapat Rp 40-an miliar untuk anggaran pembangunan, bukan anggaran rutin.

MTI: Tadi Anda menjelaskan masalah penguasaan teknologi informasi. Teknologi informasi itu tidak bisa dilepaskan dari industri informasi, sehingga ini ada kaitannya dengan dunia usaha. Jadi walaupun dengan sedikit anggaran, industri informasi ini tidak terpaku kepada pemerintah, tetapi juga peran swasta lebih didayagunakan secara maksimal?

SM: Itu tadi, industri informasi itu adalah industri media. Media televisi, radio, cetak pers, internet, dan telepon Manakala industri media diolah dengan teknologi maka jadilah semuanya ini dihandle dalam teknologi informasi. Ini kita tidak campuri. Kita hanya dorong iklim yang sehat supaya dia berkembang.

Pemerintah dalam konteks informasi tidak mencampuri yang namanya *content*. Karena dulu yang dikontrol oleh pemerintah adalah *content*. Industri tidak bisa berkembang karena *content*-nya dikontrol. Orang tidak boleh mengontrol pemerintah, bagaimana laku koran. Nah, sekarang sudah bebas, *nggak* ada lagi hambatan itu. Pemerintah tidak akan mencampuri masalah *content*.

Makanya tadi saya katakan kontrol oleh masyarakat sendiri. Jangan marah kalau pemerintah *nggak ngontrol*. Karena UU-nya tidak membolehkan pemerintah mengontrol. Ini yang kadang-kadang

masyarakat itu *nggak* sadar, dia selalu menuntut ke kita, kok Pak Syamsul orang IAIN membiarkan pornografi, gitu lho kira-kira, mereka katakan. Saya bilang kalau saya campuri itu saya dihukum dua tahun penjara. Masyarakat *nggak* tahu kalau UU-nya seperti itu.

Tugas pemerintah memberikan iklim usaha yang sehat. Sekarang, dalam iklim usaha yang sehat ini bisa saja terjadi persaingan yang tidak sehat. Seperti, media-media besar cenderung akan menguasai media-media kecil. Nah, ini nanti dikontrol dengan apa? Dikontrol dengan UU Persaingan Usaha. Dalam hal ini kita juga tidak akan campur. Tapi kalau di media mau dimonopoli seperti itu, itu dilarang, bukan dilarang tapi dibatasi istilahnya. Jadi kalau umpamanya seseorang bikin koran, bikin radio, bikin televisi, bikin internet, sendiri di satu perusahaan tidak boleh. Kalau empat dia hanya boleh tiga, kalau tiga dia hanya boleh dua. Kemudian dia juga tidak boleh mendominasi di satu daerah, itu kaitannya dengan UU Persaingan Usaha dan UU Anti Monopoli.

Jadi, itu kita bebaskan industrinya, tidak ada kontrol lagi, dibentuklah iklim yang sehat agar bisa berkembang. Dan ternyata begitu reformasi, begitu ada UU Kebebasan Pers, itu yang semula radio 800-an sekarang sudah 2.000-an lebih, yang semula penerbitan 300-an sekarang sudah ribuan lebih. Tetapi memang banyak yang seumur jagung, mati seumur jagung, ya itu soal lain lagi, karena dia tidak mampu menguasai pasar.

MTI: Ada sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum siap dengan pasar bebas, terus ada kecenderungan

kapitalisme sudah masuk ke Indonesia. Sedangkan di sisi lain ada rambu-rambu yang diatur dalam UU. Sebagai contoh, film BCG, ada sorotan masyarakat. Mana kategori film yang mengandung pornografi, dan yang layak ditonton. Akhirnya suara masyarakat itu ke pemerintah, dalam hal ini ke Menteri Komunikasi dan Informasi. Tetapi di sisi lain, Menteri sesuai aturan ada batasan. Akhirnya film itu distop karena AA Gym saja. Pembelajaran ke masyarakat, bahwa segala sesuatunya itu dulu harus bermuara ke pemerintah, sekarang ini pembelajaran masyarakat harus tahu bahwa aturan itu dibentuk untuk

masyarakat, juga untuk pemerintah?

SM: Jadi memang, tadi saya katakan dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada lagi mobil penyuluhan sampai ke bawah, mobil unit itu, belum lagi faktor otonomi daerah. Di sini ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, di tingkat dua belum tentu ada Infokom itu, bisa cuma ada Biro Humas. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini memang mata rantai ke bawah agak sulit.

Sehingga saya ingin katakan, saya termasuk yang belum puas dengan model penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat. Mestinya pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan itu kepada masyarakat, tapi terhambat oleh tadi kementerian yang tidak operasional, terhambat oleh otonomi daerah yang tadi mata rantainya tidak sampai

ke bawah terputus, kemudian terhambat juga oleh orientasi dari media yang ada itu lebih kepada komersial. Sehingga aspek-aspek yang pendidikan, aspek yang positif itu kurang.

Karena koran, media, termasuk televisi mengatakan *bad news is a good news*. Jadi kan, modelnya cari yang jeleknya saja. Pak Syamsul kalau misalnya menjelaskan tentang kebebasan pers dan tidak ada kewenangan pemerintah, itu bukan berita. Tapi kalau saya suatu saat marah dan mengatakan ini harus dibredel, ini baru berita. Makanya saya katakan pada waktu itu, banyak kawan yang menyarankan supaya kita turun ke daerah-daerah saja, kita turun safari ramadhan kayak Pak Harmoko supaya lebih populer dan bisa menyampaikan informasi ke masyarakat. Saya bilang, apa memang harus begitu lagi, gitu lho.

Jadi untuk sementara ini, saya lebih konsentrasi untuk menyusun *platform*, menyusun *grand strategy*, menyusun perencanaan yang komprehensif, sehingga nanti sistem itu jalan dengan lebih baik. Nah, siapapun nanti penerusnya barang ini sudah terencana dengan baik.

Kalau kita ingin mengatakan, saya mengambil sisi filosofi saja ya, kita ini reformasi, reformasi itu apa, reformasi itu sebetulnya dekonstruksi. Jadi kita bubarkan, kita ganti yang tidak benar, konstruksi yang tidak benar ini dirusak dululah karena ini tidak baik. Kemudian kita rekonstruksi, kita bangun kembali. Dekonstruksinya sudah jalan, rekonstruksinya belum. Sistem belum terbentuk secara komprehensif. Nah, saya kan di bidang yang harus membentuk sistem itu.

Sistem itu ya UU, ya kebijakan, ya perangkat, ya institusi, itu yang tadi saya katakan *grand strategy*-nya Kominfo.

MTI: Kembali ke *grand strategy* itu, kan selama dua atau tiga tahun terakhir Tim Anda sudah merumuskan yang tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa. Bagaimana titik sambungnya nanti dengan pemerintahan yang baru. Apa upaya Anda sehingga apa yang dirumuskan itu bisa diterima atau diterapkan dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang?

SM: Kementerian ini, institusi ini menyiapkan memori serah terima. Dan memori serah terima itu saya rencanakan untuk dipublish. Jadi, jangan hanya catatan menteri saya kepada menteri baru, habis itu habis. Tapi saya bicara kepada publik begini keadaannya. Jadi katakanlah setelah serahterima itu menteri yang menyerahkan dengan menteri yang menerima itu duduk bersama dengan media. Dan memori serahterima itu paling tidak resumennya dibagikan supaya itu juga menjadi milik publik.

Dan satu lagi, *grand strategy* dalam bidang komunikasi dan informasi ini pada tahun 2005 akan dibawa ke dalam sidang WSIS (*World Summit on Information Society*), di Tunisia, dipersandingkan dengan yang lain-lain di dunia. Jadi memang dunia yang global itu betul, hampir menyatu itu benar.

MTI: Presiden dan Wakil Presiden yang baru terpilih ini juga ada dalam kabinet kemarin. Apakah *grand strategy* ini juga ada dalam pikiran mereka waktu bersama-sama dalam



SYAMSUL MU'ARIF, GALANG KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI ■ e-ti/ad

kabinet?

SM: Kalau yang baru belum, belum tahu persis. Karena itu tadi harus ada memori serah terima untuk pemerintahan yang baru. Namun sebagian besar sudah dikoordinasikan dalam kabinet. Makanya UU lahir, Keppres lahir, Inpres lahir. Itu setelah ada mekanisme dari kita ke koordinator bidang Polkam, dari Koordinator bidang Polkam nanti ke Sekneg. Seluruh alur kebijakan itu tetap terintegrasi. Dan, setiap kebijakan di sini harus diketahui oleh menteri-menteri yang lain. Jadi ketika Keppres tentang TKTI lahir seluruh menteri itu harus terima. Ketika Inpres tentang e-Gov seluruh menteri harus terima. Ketika saya membikin pedoman maka saya sampaikan kepada seluruh menteri termasuk gubernur dan bupati.

MTI: Berarti, calon presiden yang baru dan wakil presiden yang baru merupakan *inner circle* ketika platform ini digagas?

SM: Oh, iya, ya.

MTI: Secara substansial ada perbedaan yang sangat fundamental jika suatu saat kementerian ini menjadi departemen. Artinya, kebetulan bidang ini informasi dan informasi itu bersifat transparan, demokratis, itu berbeda dengan model-model departemen yang kita kenal selama ini. Bagaimana menghadapi disonansi kognitif demikian?

SM: Ya. Makanya tadi saya katakan, yang terkait dengan informasi dan industri informasi itu dalam tanda petik milik masyarakat, tidak dicampuri oleh pemerintah. Apa yang disiapkan oleh Pemerintah,



SYAMSUL MU'ARIF DI DEPAN MAHASISWA FISIP UI ■ e-ti/ad

ICT tadi, *information and communication technology, electronic government*, penyusunan data yang masih sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik dan penyediaan administrasi pemerintahan, termasuk tadi e-procurement, pelelangan elektronik. Makanya kita harus mulai dulu dari sekolah. Sekolah sudah *ngerti* internet, begitu dia jadi pegawai negeri dia sudah *ngerti* internet, dia bisa mendayagunakan ini. Itu aspek yang berjiwa strategis sekali baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Nah, konsentrasi nanti, kalau dia jadi departemen bukan informasi yang ditangani, tapi aspek telematika ini. Karena telematika itu akan menjadi pemicu atau *trigger* untuk kemajuan bangsa ke depan.

MTI: Salah satu kendala departemen adalah birokratis, berbeda spiritnya dengan informatika?

SM: Tadi sudah saya katakan, kelemahan birokrasi itu apa, budaya birokrasi yang dibentuk 32 tahun dia menjadi penguasa, dia menjadi pemerintah, kita salah membuat istilah. Istilahnya orang birokrasi itu pemerintah, pemerintah itu kan berarti tukang perintah. Mestinya, birokrasi itu public service, pelayanan publik sebetulnya. Tapi kita tidak pakai istilah itu, salah sendiri kan. Nah, makanya itu harus kita ubah mentalnya dari birokrasi itu menjadi melayani. Kalau belum ada mentality itu, ICT ini nggak jalan di pemerintahan, dia akan dilawan. Karena apa, karena

orang yang biasa dapat amplop sekarang nggak dapat amplop lagi.

Tetapi yang dijamin oleh pemerintah apa, kesejahteraan pegawai negeri akan lebih baik. Pegawai negeri tidak akan meluas banyak, sektor pemerintah akan berkurang, sektor swasta akan meluas. Tetapi pegawai negeri itu sudah memiliki data, dia hanya manajemen data. Manajemen data akan mempermudah pelayanan. Jadi kalau umpamanya seseorang hilang berapa tahun, tinggal siapa nama, siapa bin-nya, siapa keluarganya, dan nomor kependudukannya. Seperti di Amerika, walau seseorang menghilang 20 tahun, jika nomor kependudukannya dicari, masih ada. Kira-kira akan seperti itu yang akan kita bangun ke depan.

Jadi, nggak mungkin lagi satu orang memiliki dua nomor, nggak mungkin lagi. Karena kalau umpama beda, orangtua beda, bahkan kalau data itu benar itu masuk urat mata masuk ke dalam sistem. Jadi potret orang itu ada di komputer. *Nggak* susah lagi cari yang namanya Azhahari itu jika sudah ada datanya dalam komputer.

MTI: Dengan *paperless* di era informatika kehilangan pula kontak dengan orang lain sekaligus kehilangan "mata pencaharian" tambahan bagi banyak orang?

SM: Betul, tapi itu di birokrasi! Tadi saya sudah katakan terjadi efisiensi di pemerintahan, di birokrasi. Birokrasi akan menyedikit tetapi swastanya menguat. Karena apa, karena begitu saya membangun sistem informasi, saya tidak boleh menunjuk staf atau seseorang membangun sistem informasi, tapi harus bekerja sama dengan suatu perusahaan. Di Malaysia e-

procurement disebut dengan e-perolehan. E-Perolehan itu menunjuk (tender) suatu perusahaan, untuk bertanggungjawab mengelola selama delapan tahun. Setelah delapan tahun, baru dilakukan birokrasi. Jadi birokrasinya magang dulu dalam sistem itu. Kalau nanti begitu ditangani birokrasi, menurun, itu berarti birokrasinya yang *nggak* benar. Tapi kalau dia itu bisa jalan seterusnya akan terjadi perbaikan administrasi pemerintahan yang hebat ke depan.

MTI: Anda tadi kemukakan, setiap pertumbuhan informasi satu persen akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi

belum! Karena kita masih berada dalam sistem tatanan lama yang belum direkonstruksi tadi. Contohnya sederhana. Duopoli telekomunikasi, UUnya itu sudah liberalisasi tapi sampai sekarang masih duopoli. Sebetulnya secara hakekatnya itu bertentangan dengan UU. Tapi itu masih terjadi. Kenapa? Karena belum berpola pikir untuk yang tadi, yang reformasi.

MTI: Padahal secara filosofis, siapa yang menguasai informasi dia yang menguasai dunia?
SM: Betul.

MTI: Sebenarnya itu sudah diketahui oleh umum, tetapi secara ekonomis tadi, hitungan

seluas pandang presiden saja yang nanti akan menyusun itu. Presiden, pada awalnya mudah-mudahan membentuk perencanaan yang komprehensif untuk lima tahun. Makanya kalau di Malaysia ada yang namanya Visi 2020, itu kan pembangunan jangka panjang. Bahaya di kita adalah ganti presiden ganti pola, itu bahaya.

Kelanjutan

MTI: Itu yang kita khawatirkan. Padahal sudah demikian baik perencanaan mengangkat Indonesia untuk sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam penguasaan informasi oleh

walaupun di luar pemerintahan. Yang namanya pikiran dan konsep *kan* harus tetap untuk kepentingan bangsa. Kalau saya melihatnya seperti itu, saya hanya berpikir untuk melaksanakan tugas. Jadi kalau Bung Robin umpamanya mikirin nih Pak Syamsul kapan ke Cikeas, saya *nggak*, saya *nggak* akan lakukan itu. Tapi kalau diperlukan, saya akan menyiapkan diri.

MTI: Bagaimana informasi dan *grand strategy* ini sampai ke sana?

SM: Ha...ha...ha... Tadi kan sudah dikatakan, kita itu di kabinet mulainya sama-sama. Jadi saya ingin katakan ke TokohIndonesia ini ya, ketika saya menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi saya lapor ke koordinator saya. Koordinator saya itu namanya Susilo Bambang Yudhoyono, karena beliau adalah Menko Polkam. Apa pernyataan beliau yang pertama? Beliau tidak bicara tentang kebebasan pers atau segala macam, *nggak*. Melainkan, "Pak Syamsul, pelajari yang namanya Malaysia."

Itu bulan Agustus. September saya diundang APICTA (*Asia Pasific Information and Communication Technology Award*), di Malaysia, memberi penghargaan tahunan kepada orang-orang berprestasi di bidang teknologi informasi. Saya datang ke sana. Itulah pertama kali saya berkenalan dengan Multimedia Supercoridornya Malaysia.

Mahathir Muhammad membangun tiga jaringannya, yaitu ibukota negara dipindahkan dari Petaling Jaya di Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Putra Jaya seluruhnya jaringan teknologi informasi *wireless*. Jaringan industrinya dibangun di



SYAMSUL MU'ARIF, KOORDINASI KESAMAAN VISI DAN MISI ■ e-li/ad

tiga persen. Apakah kesadaran ini sudah dimiliki oleh semua aparat pemerintah (perencana dan penentu kebijakan) di negara ini, untuk bisa memprioritaskan pertumbuhan informasi?

SM: Belum, belum,

pertumbuhan itu belum membumi?

SM: Ya, belum membumi. Itu yang tadi memerlukan kesamaan visi dan persepsi. Dan saya terus saja termasuk yang bertanya di mana itu disusun? Kita *nggak* ada GBHN lagi, berarti kan

kementerian ini dalam tiga tahun terakhir. Bagaimana ini nanti bisa berlanjut, atau mungkin Anda yang akan tetap menteri supaya ada jaminan kesinambungannya?

SM: Ya, tidak harus! Dari segi peran bisalah



SYAMSUL MU'ARIF, DUNIA MENUJU INFORMATION SOCIETY ■ e-ti/kominfo

Cyber Jaya. Di sana untuk industri teknologi informasi, 10 tahun bebas pajak. Kemudian, dibangun Kuala Lumpur International Airport, nomor dua sistem pelayanan terbaik di dunia setelah Hongkong. Siapa di balik ini? Mahathir Muhammad. Dan siapa yang dia gunakan sebagai penasihatnya? Bill Gates.

MTI: Pemerintahan Ibu Mega secara makro berhasil, tetapi keberhasilan dari sisi mikro kan banyak masyarakat yang nggak tahu. Bagaimana lebih

mempopulerkan Kominfo agar masyarakat dapat mengakses informasi pertumbuhan suatu daerah kabupaten, misalnya?

SM: Jadi, nanti yang sedang kita rencanakan, bantuan Bank Dunia sedang kita usulkan, itu adalah Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dan Balai Informasi Masyarakat. Balai Informasi Masyarakat ini bukan konsep pemerintah, tapi konsep TKTI-Mastel (Masyarakat Telematika). Mereka membuat konsep sejenis kios di pedesaan.

Sekarang, baru Telekomunikasi Pedesaan melalui Departemen Perhubungan yang dikirim. Nanti yang akan kita bangun itu Balai Informasi Masyarakat yang oleh masyarakat sendiri. Pemerintah hanya membantu. Barangkali operatornya satu dua tahun akan disiapkan oleh negara. Lalu, nanti manakala e-gov itu sudah jalan, maka setiap institusi pemerintah akan melayani publik, baik melalui internet, telepon maupun surat tentang informasi.

Kalau itu di masyarakat terbangun, kemudian di pemerintahan terbangun dengan e-gov ini, orang mau tahu yang namanya Kutai Kertanegara berapa pendapatannya satu tahun, mana kita tahu itu nomor satu di Indonesia, punya pendapatan Rp 2,5 triliun.

Balai Informasi Masyarakat bukan hanya informasi kepada pemerintah seperti yang anda katakan dibutuhkan itu tadi, tetapi petani di kampung itu mau beternak itik, dia nggak ngerti dimana

dapat bibitnya, bagaimana memeliharanya, apa persyaratan lingkungannya, dia nggak ngerti. Dia tanya melalui Balai Informasi Masyarakat, masuk ke BPPT, BPPT punya website yang memberikan modul pembelajaran tentang macam-macam, beternak itik umpamanya, menanam cabe umpamanya.

Kalau dia nelayan, mau melaut tanyanya ke BMG, arus laut kaya apa, kecukupan angin kaya apa, ikan bergerak ke mana, kira-kira begitu. Kalau teknologi informasi ini lebih canggih lagi, seperti terjadi

di Korea Selatan, itu ikan bergerak dipotret dari satelit, dipotret dari kapal. Itu kira-kira manfaat ke depan dengan adanya sistem ini.

Tapi saya masih mengatakan ini mimpi. Di negara lain ini sudah terjadi. Di Philipina dia pakai kios. Nanti orang kampung di Kalimantan, ada anaknya sekolah di Jakarta, dia mau ngrim wesel bagaimana. Melalui Pos, karena nanti kan wesel itu tidak melalui kartu wesel seperti yang dulu, sudah internet langsung terkirim masuk ke rekening anak kita di Jakarta.

MTI: Rencana implementasi kapan kira-kira?

SM: Sebetulnya langkah terobosannya banyak, Ibu Mega banyak melakukan sesuatu tetapi sulit untuk dibahasakan karena informasi tadi terputus. Saya banyak diketawakan juga, lho kok ini kurang bunyi. Karena orang beranggapan kita ini juru bicara pemerintah, tapi tidak juru bicara pemerintah, ya susahlah.

Apa Saja Syaratnya?

MTI: Kalau tidak salah, tahun 2015 harus dicapai untuk bisa masuk *information society*, apa saja syarat-syaratnya dan apakah bisa dicapai Indonesia?

SM: Berat untuk dicapai Indonesia tapi kita harus menuju ke arah sana. Salah satunya adalah siaran radio dan televisi harus 100 persen penduduk dapat menerimanya. Kalau itu barangkali bisa. Tapi internet tadi, baru empat persen akses, harus ditingkatkan menjadi lebih 50 persen penduduk, itu yang cukup berat. Kemudian sistem informasi itu terintegrasi



SYAMSUL MU'ARIF BERSAMA AMIEN RAIS ■ e-ti/ad

kembangkan dalam dunia yang katakanlah zaman edan kalau kita pakai Ronggowarsito.

Diminta Pulang Kampung

Sekarang ini, saya ingin sampaikan, saya diminta oleh partai saya di Kalimantan Selatan untuk pulang dan menjadi calon gubernur. Apa jawaban saya kepada masyarakat? Saya bilang, saya tidak memiliki ambisi apa pun. Tapi kalau tulus masyarakat itu menghendaki saya

untuk pulang walaupun saya ini adalah menteri, saya siap untuk melaksanakan tugas itu. Tapi misisonya apa kalau saya harus pulang?

Saya kebetulan mengikuti jam 11 malam di SCTV, ada satu kabupaten baru namanya Tanah Bumbu. Di Tanah Bumbu itu, *illegal minning*-nya luar biasa di Kalimantan Selatan. Jadi, kalau keluar malam, kota Banjarmasin penuh dengan arus masuk dan keluar kota angkutan batu bara. Jadi, setengah badan jalan rusak sebelahnya nggak. Karena yang lewat situ bawa batu bara kalau pulang kan sudah kosong.

Pak Nabiel Makarim memperhitungkan dibutuhkan 3-4 trilyun untuk mereklamasi, untuk mengembalikan alam. Betapa rusaknya, karena penambangan liar. Makanya, sekarang di Kalimantan Selatan ada ratusan sungai yang sudah tidak ada lagi airnya. Bayangkan kalau Kalimantan sudah kayak begitu, dia paru-paru dunia,

mulai dari sekolah. Jadi sistem kurikulumnya akan sama, SD di manapun akan sama kurikulumnya. Kemudian akan dikembangkan *e-learning*, *e-library*. Sistem perpustakaan dan pembelajarannya menggunakan teknologi informasi. Jadi orang bisa belajar dengan model pembelajaran internet. Itu sudah termasuk yang direncanakan untuk tahun 2015.

Desa, kecamatan, kota/kabupaten tingkat dua sampai propinsi dan pusat, integrasi dalam sistem informasinya. Perpustakaan dan kebudayaan juga sudah seperti itu. Jadi ada sistem-sistem informasi yang integrated, makanya di nasional kita harus membangun database nasional. Di propinsi ada database propinsi, kabupaten ada database kabupaten, atau data center.

Data-data center ini menjadi bagian dari sistem nasional di komunikasi dan informasi. Ada 10 ukuran-

“Saya berprinsip, dalam hidup ini tidak mengejar jabatan.”

ukuran itu. Sama dengan *Millenium Development Goal* (PBB) dan *information society* (ITU) serta *knowledge society* (Unesco). Ini sudah kesepakatan dunia yang kita harus mengarah ke sana, terlepas dari segala kelemahan kita. Makanya saya katakan, paling tidak kita mimpi dululah.

Ke Cikeas

MTI: Tadi Anda mengatakan tidak akan pergi ke Cikeas, apa itu terkait dengan posisi Anda sebagai kader Golkar, atau bagaimana?

SM: Maksud saya, saya

berprinsip dalam hidup itu adalah tidak mengejar jabatan. Saya tidak tahu mengapa saya dibentuk seperti itu. Berkeinginan itu tidak boleh. Itu prinsip hidup saya. Tetapi kalau saya diberi tugas, saya harus laksanakan dengan baik. Semampu saya.

Waktu jadi menteri, saya bersedih di depan anak dan isteri. Saya katakan, saya jadi anggota DPR saja sudah jarang makan bersama di rumah. Apalagi jadi menteri! Itu kesedihan saya yang pertama.

Kesedihan yang kedua, di tengah keluarga itu, hadir kawan-kawan masyarakat Kalimantan Selatan, karena saya orang Kalimantan Selatan. Saya katakan mulai saat ini, saya tidak bisa berpikir untuk Kalimantan lagi, saya harus berpikir untuk Indonesia. Mohon maaf, saya bilang, saya tidak boleh memprioritaskan kampung saya karena saya sudah milik nasional.

Filosofi-filosofi seperti itu memang agak sulit kita

apa yang akan terjadi? Kira-kira itu alasannya, pulang dong Pak, untuk memperbaiki keadaan ini. Kita perlu menyadarkan masyarakat bagaimana memperbaiki sungai itu tanpa merusak perekonomian rakyat.

Jadi, saya bilang, kalau itu tujuannya, saya siap kalau memang masyarakat menghendaki. Lalu apa yang saya katakan, tapi minta ijin dulu dong melalui mekanisme partai. Saya secara pribadi, tidak menjadi soal apakah menjadi menteri, menjadi gubernur, atau tidak jadi apa-apa.

Saat ini, saya mempunyai tiga pilihan. Pertama, menteri, tapi partai saya kan mengatakan kalau saya jadi menteri, saya dipecat. Pak Akbar mengatakan itu. Saya tunduk kepada partai. Saya tidak tahu kalau umpamanya betul-betul diminta, saya harus bersedia dipecat atau saya harus menolak. Ini masalah yang pertama. Ini terjadi bulan Oktober.

Kedua, bulan Desember, Munas partai saya. Terus terang saja, saya agak kurang sependapat dengan Pak Akbar untuk menempatkan diri sebagai oposisi permanen. Kalau oposisi loyal barangkali boleh. Tapi kalau oposisi dalam arti permanen rasanya tidak cocok. Permanen itu ditunjukkan dengan tidak mau satu orang pun dari kadernya untuk duduk di kabinet.

Nah, berarti saya juga harus memikirkan bagaimana partai saya lima tahun ke depan. Bukan menjadi ketua umum partai. Bukan. Tapi kalau umpamanya partai saya membutuhkan, saya kan nggak bisa pulang untuk yang ketiga yaitu kira-kira awal tahun 2005, pemilihannya sendiri terjadi pada bulan Juni yaitu pemilihan gubernur.

Dari ketiga pilihan ini harus dilakukan



SYAMSUL MU'ARIF HADIRI BERBAGAI SEMINAR ■ e-ti/ad

manajemennya dari sekarang, melakukan pilihan-pilihan, dan satu antara lain tidak bisa saling berhubungan. Umpamanya, kalau saya masuk ke kabinet, saya harus berhenti dari partai, berarti nggak bisa ikut di partai. Kalau saya jadi gubernur, saya nggak bisa ikut DPP, nggak bisa jadi menteri. Jadi, ini harus alternatif, ini yang harus saya pikirkan. Tidak berarti saya harus menteri tidak berarti saya harus jadi gubernur. Saya bisa saja ada ambil di partai, tidak menjadi ketua umum partai tapi untuk menjaga supaya partai saya ini lima tahun ke depan dihormati oleh rakyat karena menyelamatkan perjalanan republik. Saya ingin seperti itu.

Kalau saya berada di kabinet, saya ingin juga, walaupun presidennya Ibu Mega PDI-P, wakil presidennya PPP, saya Golkar, saya dan kawan-kawan di lintas fraksi itu bertekad ini harus selesai sampai 2004. Makanya saya tidak berpikir untuk keluar dari kabinet walaupun kawan-kawan saya banyak yang marah. Tapi akhirnya apa, eh, ternyata partai saya mendukung Ibu Mega. Padahal waktu pertama-pertama, saya termasuk yang agak dimusuhi. Loh kok kita berkelahi di bawah,

Pak Syamsul ikut ditempatkan di atas. Kan begitu waktu Pemilu 99.

Tapi baiknya ada kesadaran. Platform bersama itu yang penting bagi kepentingan nasional. Nah, kalau sudah ada hitam putih seperti yang dikembangkan Pak Akbar sekarang, wah bisa membahayakan juga. Nggak tahulah itu yang kemaren. Saya tidak melakukan pilihan.

Saya ikut filosofi air mengalir saja. Saya ada di dalamnya, yang penting saya tidak tenggelam dalam air itu. Tapi mengikuti arus, bersahaja apa adanya.

MTI: Anda punya filosofi demikian, padahal waktu mengagagas Lintas Fraksi dahulu menjatuhkan Gus Dur, Anda termasuk motor yang sangat aktif?

SM: Dulu itu lintas fraksi, saya ketua fraksi. Pada waktu itu, presidennya Gus Dur. Saya tidak ingin menjatuhkan Gus Dur, saya ingin memperingati Gus Dur agar memperbaiki manajemen pemerintahan. Saya tiga kali pada waktu itu, kalau tidak salah, melalui orang-orang tertentu diminta untuk bertemu dengan Gus Dur. Saya menolak. Barangkali saya lebih cepat jadi menteri kalau seandainya saya mau

datang pada waktu itu. Karena apa. Saya ingin memberi peringatan pada Gus Dur untuk memperbaiki manajemen pemerintahannya. Tapi nggak jalan-jalan.

Sekarang setelah saya tidak di pimpinan fraksi lagi, terkonsentrasi di sini, kegiatan untuk partai pun saya kurang. Tidak lagi aktif dalam lintas partai. Makanya dalam konteks membangun lintas partai yang sekarang, membangun koalisi itu, saya tidak mengambil peran. Kampanye pun saya tidak banyak mengambil peran karena kebanyakan harus melaksanakan tugas di sini. Saya beranggapan ini tugas negara, tugas partai masih ada yang lain, kecuali memang sangat dibutuhkan.

MTI: Ini kan waktunya sudah sangat pendek untuk menjatuhkan pilihan-pilihan, menjadi menteri atau apa?

SM: Saya katakan, saya tidak melakukan pilihan itu. Saya mengikuti seperti air mengalir. Saya dibawa ke mana, di mana nyangkutnya, saya akan terima semua kenyataan itu. Termasuk pulang kampung tidak jadi apa-apa pun, itu sudah saya siapkan.

Itu artinya, kita harus siap yang namanya kita

merangkak dari bawah pelan-pelan ke atas, yah, kita harus siap ke bawah lagi. Makanya belajarliah. Kemarin, saya ke Semarang, nggak pakai ajudan. Kita belajar lagi untuk duduk bukan di ruang VIP tapi biasa. Tadi pagi pulang juga begitu. Jadi di airport, orang Garuda heran. Kok Bapak nggak ada ajudan, nggak ada yang melayani lagi. Saya paling dua tiga kali pakai VIP di Bandara Soekarno Hatta. Saya memang terbiasa hidup yang biasa saja. Duduk pun bersama kawan-kawan yang umum saja. Sering orang tanya, "Kok bapak tidak di VIP?" Yah, tidak harus di VIP dong. Jadi saya punya keyakinan, selama prinsip hidup itu saya pegang tidak dimusuhi orang, paling tidak

Hidup Bersahaja

MTI: Kebersahajaan Anda sudah banyak diketahui orang. Selama menjadi menteri, tiga tahun terakhir ini, bagaimana kehidupan keluarga apakah berubah?

SM: Saya paling sulit dimintai oleh kawan bantuan untuk mencari pekerjaan bagi anaknya. Itu paling sulit buat saya, karena saya tidak mencari pekerjaan untuk anak saya. Kalau saya carikan pekerjaan untuk orang lain, saya akan dicemburui oleh anak saya. Itu contoh sederhana saja dari kehidupan saya.

Anak saya di sekolah pintar sendiri, tidak pernah satu surat pun saya minta supaya diterima di ITB. Tapi anak saya diterima di ITB, diterima di UI melalui perjuangannya sendiri, kepintarannya sendiri. Saya hanya membangun disiplin di rumah tangga walaupun saya dalam bentuk yang sangat terbatas bertemu dengan keluarga tapi disiplinya

harus tetap.

Kalau saya nggak ada di rumah, saat maghrib tiba, anak saya harus memimpin ibunya ikut di belakang, berjama'ah. Itu kan pembentukan karakter. Saya bilang, berdosa saya menjadi orang yang membangun orang lain, katakan begitu, berjuang untuk orang lain, untuk bangsa, selama rumah tangga saya sendiri hancur-hancuran. Tapi saya katakan pada anak-anak, jangan karena bapak menjadi menteri, kamu jadi lebih hebat, lebih tinggi. Tapi kamu itu hebat karena punya prestasi. Itu yang saya bangun dalam rumah tangga saya. Prestasi belajar anak-anak sebetulnya memang bagus.

Bayangkan saya sampai menyuruh istri saya berhenti dari pegawai negeri. Tahun 1987 saya bersama keluarga pindah ke Jakarta. Istri saya mengurus kepindahannya ke Dinas Pendidikan DKI. Sudah masuk berkasnya, pulang. Besoknya datang orang DKI itu ke rumah, sore-sore: 'Ibu, kalau ingin beres ini, gampang saja, uang doang'.

Itulah kata-kata pertama yang dikenal anak saya tentang 'jahat'-nya Jakarta. Anak saya mendengar uang doang itu. Jadi saya bilang ke istri, 'kalau begitu sudahlah, nggak usah, ngurus anak-anak sajalah, daripada anak-anak kita nanti rusak'. Jadi istri saya cuti di luar tanggungan negara dan pensiun dipercepat, dia ngurus anak, karena saya anak banyak, enam orang. Kalau saya lepas, siapa yang mengontrol anak-anak. Itulah, saya membangun rumah tangga.

MTI: Apakah anak-anak Anda merasakan memperoleh *privilege* selama Bapak menjadi menteri?

SM: Sulit saya mengevaluasi. Barangkali

PANTANG TOLAK TUGAS, PANTANG ULUR WAKTU, PANTANG KERJA TAK SELESAI.

anak saya juga nggak suka dengan saya. Barangkali. Karena saya terlalu keras, sering marah. Anak saya yang pertama S-2, yang kedua S-2, dan ketiga juga S-2 sudah, yang keempat baru selesai S1-nya. Yang tiga ini kerja.

Yang ketiga ini perempuan di UI Sosiologi. Bayangkan saya marah sama dia kenapa, karena dia berhenti bekerja agar dia bisa menyelesaikan tesis S2-nya. Dia dulu bekerja di salah satu perusahaan. Saya bilang, kamu ini gimana, orang susah cari kerja di Jakarta, kamu tinggalkan pekerjaanmu. Gajinya kecil Pak, dia bilang. Ini perempuan. Akhirnya dia menyelesaikan tesisnya, *cum laude*. Dia langsung dapat 3 tawaran kerja. Dia kembali mengabdikan pada almamaternya walaupun barangkali gajinya lebih kecil. Padahal ada perusahaan Jepang, ada PPM menariknya. Tapi dia ambil yang di UI, jadi konsultan dan sambil ngajar, barangkali penghasilannya nggak gede tapi dia mendapat kepuasan dari itu.

MTI: Kalau Anda mengatakan hidup seperti air mengalir, apakah berarti tidak mempunyai ambisi politik?

SM: Tadi saya sudah katakan. Jadi saya itu mengajukan diri untuk pengabdian, untuk melaksanakan tugas, bukan untuk mengejar sesuatu. Ingin berbuat yang terbaik. Saya memiliki prinsip, waktu

saya dilatih di-*training*, *basic training* saya dulu di HMI: pantang tolak tugas, pantang ulur waktu, pantang kerja tak selesai. Ini saja prinsip yang harus dilakukan. InsyaAllah, kamu akan berprestasi.

Terus masih ingat melekat di kepala saya, Buya Hamka berpesan, kalau kamu menuntut keutamaan kamu konfrontasi dengan tidur. Jadi malam digunakan untuk membaca, untuk belajar, dan lain-lain.

Kemudian, kalau saya mendefinisikan bahagia itu apa. Bahagia itu bukanlah karena kita mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan. Bahagia itu adalah kemampuan untuk menahan penderitaan terpahit yang kita alami tanpa menggoncang stabilitas diri.

Sebab itu, kalau sudah sepele apapun hidup yang kita alami, kita nggak goncang. Kepahitan itu justru menjadi nikmat, gitu loh kira-kira. Jadi itu saya katakan, ini adalah orang-orang yang disebut dengan *problem hunter*. Makanya istri saya bingung kalau seandainya saya pensiun. Jadi nggak ada lagi yang di-hunter-kan. Kayak apa Bapak ini kalau sudah harus pensiun. Saya bilang itu adalah tantangan baru saya, penderitaan baru saya, yang harus saya atasi. Jadi gak perlu ada *post power syndrome*. Itu justru jadi tantangan baru, bagaimana meng-*handle* kalau tidak diberi tugas apa-apa. □ **e-ti/ht-mlp-sam**



MOORYATI SOEDIBYO

Mustika Jamu Indonesia

BRAY Mooryati Soedibyo terus melegenda sebagai pakar dan pelaku industri jamu terkemuka yang diakui dunia internasional. Ia penerima anugerah “Best of the Best Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young”, di Monte Carlo, Monaco, 4-8 Juni 2003. Di usia senja ia tetap berbakti kepada bangsa sebagai “senator” (Dewan Perwakilan Daerah), mewakili DKI Jakarta sambil bergiat menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Indonesia. Sebagai anggota senator tertua, dia pun menjadi memimpin sementara DPD sampai ketua definitif terpilih..Sang legendaris industri jamu ini tampaknya masih ingin lebih banyak mengukir prestasi dan catatan emas keberhasilan.

Jamu dibuatnya mendunia. Warisan tradisional nenek moyang dari lingkungan keraton kerajaan Jawa, yang hampir terpendam bahkan dilupakan masyarakat sebagai obat dan perawatan kesehatan dan kecantikan tubuh, olehnya diangkat kembali ke permukaan. Dengan sentuhan tangan dinginnya, jamu merek Mustika Ratu mampu dipersandingkan bersaing sejajar bahkan mengungguli obat-obatan klinis (kimiawi) keluaran industri farmasi.

Mooryati Soedibyo kelahiran Surakarta 5 Januari 1928, adalah penggali, pejuang, pemrakarsa dan pelaku industri jamu. Ia ibu lima orang anak, menikah tahun 1956 dengan Ir Soedibyo Purbo Hadiningrat, M.Sc. Pernikahan menandai perubahan hidup putri keraton cantik jelita dari yang serba dilayani menjadi melayani. Ia harus ikut suami bertugas ke Sumatera Utara sebagai Kepala Kantor Wilayah Perindustrian. Ia, mengawali prakarsa menjadi legenda penggagas kemajuan industri jamu dengan membawa jamu masuk ke salon-salon kecantikan pada tahun 1975.

Mooryati awalnya merintis usaha jamu di tahun 1960-an tak lama setelah menikah. Eskalasinya kemudian meningkat sesudah ke-5 anaknya bertumbuh besar, ditambah statusnya sebagai istri seorang pegawai negeri memberi banyak kebebasan dan waktu luang untuk berkreasi meracik jamu.

Selain pandai meracik jamu ia juga pandai “meracik” kemampuan politik. Buktinya, mantan anggota MPR-RI tahun 1997 ini terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan DKI Jakarta, pada Pemilu Legislatif 5 April 2004 lalu. Suara yang diraihnya terbesar (nomor satu) dibanding tiga tokoh politik terpilih lainnya.

Ia menjadi “senator” (DPD) tidak semata mengandalkan popularitas. Jika ditelusik ke belakang, urusan politik dan kemasyarakatan sudah semenjak gadis digeluti ibu yang mengikuti Program Doktorat S-3 Minat Utama Marketing-Strategic Management di Universitas Indonesia, Jakarta, sejak September 2003. Walaupun popularitasnya tentu sangat mendukung. Maklum, seantero tanah air, penikmat dan pengguna jamu, bahkan yang tak pernah minum jamu pun mungkin sudah pernah mendengar namanya.

Dalam catatan pribadi “meracik” kemampuan politik, Mooryati adalah mantan aktivis Laskar Putri Surakarta berjuang bersama rakyat sebagai relawan PMI Rumah Sakit Kadiolo tahun 1947-1948, saat terjadi Clash-II. Pada kesempatan itu ia aktif memberikan konsumsi bagi para pejuang tentara yang melawan Belanda dan berlingung di Keraton Surakarta.

Cantik Sejak Belia

Bagi Putri Keraton Mangkunegara, Solo ini jamu adalah obat untuk memelihara kesehatan dan kosmetika untuk merawat kecantikan tubuh. Jaringan pemasaran produk-produk obat dan kosmetika yang dihasilkan perusahaan yang didirikannya tahun 1975, PT Mustika Ratu, sudah menjangkau mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Philipina, Taiwan, Jepang, Timur Tengah, Rusia, dan Belanda. Malah, sedang dijajaki pemasaran baru menjangkau Mesir, Cina, Australia, Inggris, dan Eropa Timur.

Ekspor jamu-jamuan Mustika Ratu menyumbang pendapatan 15% dari total penjualan perusahaan, mengukuhkannya sebagai pemasok jamu dan kosmetik tradisional yang leluasa membuka jaringan distribusi baru ke seluruh penjuru dunia.

Lulusan Sarjana Sastra Inggris Universitas Terbuka, dan penyandang gelar S-2 Linguistik dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, ini menyebutkan krisis moneter boleh menurunkan tingkat daya beli masyarakat Indonesia. Namun, kondisi demikian justru mendorongnya untuk mengambil langkah ekspansi pasar ke luar negeri. Nilai tukar rupiah yang pernah melemah membuat Mustika Ratu mengalami lonjakan pendapatan dari hasil ekspor.

Anak ketiga dari lima bersaudara ini menyangand nama lengkap BRAY Mooryati Soedibyo, S.S., M.Hum. Ayahnya bernama KRMTA Poornomo Hadiningrat, mantan Bupati Brebes yang Putra KPH Hadiningrat Bupati di Demak. Sedangkan ibunya, GRA. Kussalbiyah adalah Putri Sri Susuhunan Pakoe Boewono X dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Mooryati Soedibyo yang kecantikannya masih tetap terpancar kendati usianya sudah lebih tua dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, semenjak kecil hidup bersama dan dibesarkan oleh kakek

dan neneknya Sri Susuhunan Paku Buwono X di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat.

BRAY Mooryati adalah keturunan langsung dari Pakoe Buwono X dari garis ibu. Karenanya tidaklah salah jika ia segera mengambil inisiatif dan menyediakan rumahnya Dalem Purnomo, di Jalan Moewardi Solo, dijadikan tempat penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Tedjowulan sebagai putra mahkota baru bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Ario Anom (KGPA) untuk menjadi Susuhunan Paku Buwono XIII menggantikan almarhum Paku Buwono XII, pada Selasa 31 Agustus 2004 lalu.

Evolusi Jamu

Mustika Ratu adalah potret keberhasilan evolusi pengolahan jamu. Jamu menjadi bagian dari gaya hidup modern yang tak terpisahkan. Khasiat jamu yang demikian baik merawat kesehatan dan kecantikan tubuh, dimunculkan dalam beragam produk dan kemasan yang menarik. Jamu, diramu dan digali dari kekayaan keanekaragaman tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Jamu tak lagi harus diminum bergelas-gelas untuk merawat kesehatan dan mempercantik tubuh, misalnya. Melainkan, bisa dalam bentuk ekstrak pil yang merupakan intisari beragam jenis dan jumlah tumbuh-tumbuhan.

Di tangan ahli Mooryati jamu menjadi sama bergengsinya dengan produk obat-obatan dan kosmetika kecantikan modern. Telah diolah berdasarkan modernisasi teknologi dan industrialisasi, sehingga jamu bisa



MOORYATI SOEDIBYO, SENATOR DKI ■ e-ti/ht

berbentuk ekstrak dalam kemasan pil. Jamu tetap mempertahankan identitas dan “merek dagangnya” sebagai jamu. Sebab di situlah letak kekayaan jamu sebagai warisan nenek moyang yang luhur, sekaligus membedakannya dengan obat-obat dan produk kecantikan lain keluaran industri farmasi. Pada jamu terdapat pula pengagungan masyarakat akan kepandaian nenek moyang memelihara tubuh dan kecantikan diwariskan secara turun-temurun khususnya di lingkungan keraton.

Penggunaan identitas dan sebutan jamu adalah jaminan lain lain tersedianya pangsa pasar luas. Sebab ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap khasiat jamu yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Malah, di abad globalisasi

semakin berkembang kebiasaan dan gaya hidup baru untuk kembali ke alam, *back to nature* di seluruh dunia dengan menggandrungi produk yang terbuat dari bahan alami dan proses produksi tidak merusak kelestarian alam. Jadilah masyarakat kalangan bawah hingga elit menjadi pengguna fanatik jamu untuk menjaga kesehatan dan merawat kecantikan tubuh.

Mooryati berhasil mempersandingkan kesejajaran jamu dengan obat-obatan modern bukan secara mudah. Produk jamu kosmetik tradisional keluaran Mustika Ratu selalu dipertahankan dibuat dari bahan alami. Hampir seluruh produk Mustika Ratu diramu sesuai resep leluhur, pusaka keraton Surakarta Hadiningrat yang diwariskan turun temurun. Perbedaannya adalah, produk-produk jamu itu kini dibuat dengan menggunakan tehnik dan mesin modern yang memenuhi standar ketat kualitas dan keamanan.

Berawal dari Rumah

Hidup bersama dan dibesarkan oleh kakek dan nenek Sri Susuhunan Paku Buwono X di Keraton Surakarta Hadiningrat, semenjak kecil Mooryati Soedibyo menjalani keseharian hidup penuh dalam tradisi-tradisi ningrat. Demikian pula, ia tekun mempelajari seni meracik jamu dan perawatan kesehatan serta kecantikan tradisional, serta mendalami beragam jenis kesenian tradisional Jawa. Ia dibimbing langsung oleh eyang puterinya mempelajari dan mewarisi pengetahuan memilih tetumbuhan berkhasiat, lalu meraciknya untuk merawat kesehatan dan kecantikan tubuh.

Tak heran jika pada usia 15 tahun ia sudah menguasai teknik-teknik tata rias dengan baik. Ia sangat cekatan membantu merias para penari Bedhaya dan Serimpi setiap kali penari itu hendak menari di Pendhapa Ageng Keraton Surakarta. Ngadi Saliro Ngadi Busono dan Tata Krama Jawa juga dikuasainya dengan baik.

Setelah tahun 1956 menikah dan mengikuti suami bertugas ke Sumatera Utara, terbukalah

kesempatan bagi ibu muda Mooryati mengembangkan keterampilan mengolah jamu sebagai pengisi waktu luang penyalur hobi dan obat rindu akan leluhur keraton. Ia, antara lain membuat lulur dan jamu yang dibagikan secara gratis kepada para istri sejawat suaminya. Semata-mata demi hobi, ia dengan senang hati mau membuat jamu Komajaya, Komaratih, Lulur, Mangir, Parem Lengkap, dan sebagainya pesanan ibu-ibu yang berniat menikahkan anak. Sebagai istri seorang Kakanwil, merangkap Ketua Umum Rukun Istri Departemen Perindustrian (RIAN), ia berhasil membangun hubungan persahabatan secara luas dengan siapa saja tanpa batas.

Ia akhirnya merasa kewalahan. Pesanan ramuan buatan tangannya tak lagi bisa dilayani dengan cuma-cuma. Ramuan beras kencur ramuan tangannya berhasil menarik minat pelanggan, sehingga semua pelanggan itu mau mengambil sendiri secara teratur ke rumah. Ia, mulai tahun 1973 konsentrasi penuh membuat jamu dibantu dua orang teman, dengan modal usaha awal Rp 25.000. Ia memulainya dari industri rumahan. Tak lama, tahun 1975 Mooryati resmi

mendirikan PT Mustika Ratu untuk memayungi usaha pembuatan jamunya.

Mustika Ratu awalnya memproduksi lima macam jamu saja. Yaitu Perawatan Wanita, Perawatan Remaja Puteri, Sedet Saliro (pelangsing tubuh), Sepetan Sari (keputihan), Kesepuhan (Menopause), ditambah beberapa macam kosmetik tradisional leluhur, seperti Mangir, Bedak Dingin, dan Air Mawar. Pada tahun yang sama, 1975, Mooryati menggagas sekaligus melaksanakan mengajarkan ilmu kecantikan secara tradisional kepada para ahli kecantikan, pemilik salon, dan sanggar-sanggar. Usahanya semakin berkembang jumlah karyawan bertambah.

Pada tahun 1978 produk-produk Mustika Ratu mulai didistribusikan ke toko-toko, melalui salon-salon kecantikan yang meminta menjadi agen. Dan, memasuki awal tahun 1980-an Mustika Ratu mulai ekspansi mengembangkan jenis-jenis kosmetik tradisional. Masyarakat mulai akrab mengenal dan menggunakan produk-produk kecantikan tradisional keluaran Mustika Ratu, yang gencar dipopulerkan melalui artikel dan konsultasi kecantikan di majalah, serta melalui kegiatan periklanan di media cetak dan elektronik.

Dia harus merelakan garasi rumahnya penuh dengan bahan baku jamu, yang baunya menyebar hingga ke luar rumah. Ia memang mengawali bisnis jamunya sebagai industri rumahan. Ia lalu melengkapinya dengan pengadaan sebuah mesin sederhana pembuatan pil, yang didatangkan khusus dari Taiwan.

Sebagai aktivis di berbagai bidang sosial kemasyarakatan, Mooryati memiliki segudang pengalaman berorganisasi. Untuk berbagai aktivitas dan pengabdianya itu, ia memperoleh pula banyak pengakuan dan penghargaan dari pemerintah maupun swasta, seperti Upakarti, Satya Lencana Pembangunan, Tata Rias Internasional, Kalpataru, hingga anugerah sebagai Best of the Best Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young yang acara puncaknya diselenggarakan di Monte Carlo -Monaco pada tanggal 4-8 Juni 2003. □ e-ti/ht-
ms

BIODATA:

Nama:
BRAY Mooryati Soedibyo, S.S., M.Hum.
Lahir :
Surakarta , 5 Januari 1928
Agama:
Islam
Suami:
Ir. Soedibyo Purbo Hadiningrat, M.Sc
Anak:
Lima Orang
Ayah:
KRMTA Poornomo Hadiningrat Bupati Brebes
Ibu:
GRA. Kussalbiyah Putri Sri Susuhunan Pakoe Boewono X
Pendidikan:
1. 1954, Universitas Saraswati Surakarta Jurusan Sastra Inggris, Program D-3
2. Tahun 1977, Bahasa Perancis di Centre Culturel Francais Tk VI
3. Tahun 1981, Ahli Kecantikan Internasional Cidesco-Vancouver-Canada
4. Tahun 1995, Doktor Honorus Causa dari Pacific Western University Los Angeles USA
5. Oktober 2000, S-1 Universitas Terbuka (UT) Jurusan Penterjemah (Translation)
6. Januari 2003, -S2 Program Studi Linguistik Penterjemahan Bahasa Inggris Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta
7. September 2003, Kuliah Program Doktorat S3 Minat Utama Marketing -Strategic Management Universitas Indonesia Jakarta
Pengalaman Pekerjaan:
1. Direktur Utama, PT Mustika Ratu Tbk
2. Direktur Utama, PT Mustika Ratu Investama
3. Direktur Utama, PT Mustika Ratu Centre
4. Direktur Utama, PT Mustika Princess Hotel

Tempat Anda Membeli

MAJALAH BIOGRAFI TokohIndonesia

MAJALAH BERBASIS ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
url: www.tokohindonesia.com - www.e-ti.com
PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Distributor Toko Buku:

■ PT. CENTRAL KUMALA SAKTI

Komplek Green Ville Blok BG No.67
Jakarta Telp. (021) 5640185, 5658088

TB. GRAMEDIA

- Taman Anggrek Mall ■ Citraland Mall
- Pondok Indah Mall ■ Mega Mall, Pluit
- Hero Gatot Subroto ■ Melawai
- Matraman ■ Kelapa Gading Mall
- Cempaka Mas ■ Pintu Air
- Gajah Mada ■ Cinere Mall ■ Metropolitan Mall, Bekasi ■ Bintaro Plaza ■ Mahkota Mas, Tangerang ■ Karawachi Mall, Tangerang ■ Daan Mogot Mall, Tangerang

TB. GUNUNG AGUNG

- Taman Anggrek Mall ■ Pondok Gede
- Blok M Plaza ■ Kwitang 6 ■ Kwitang 38
- Blok M Plaza ■ Kramat Jati Indah
- Atrium Plaza ■ Tambun ■ Jl. Ir. Juanda, Bekasi ■ Arion Plaza ■ Depok Plaza
- Citraland Mall ■ Sunter Mall ■ Hero Tendea ■ Trisakti

OFFICE

- Ambassador Mall ■ Ranch Market, Kb. Jeruk ■ Cimone

TB. GUNUNG MULIA

- Jalan Kwitang

Distributor Agen:

■ KEDARTON AGENCY

Stasiun Senen, Jakarta Telp. 021-9119176

AGEN UTAMA

- KPA, Terminal Senen, Tlp.42877451
- MARLIN, Stasiun KA Senen, 08129956840
- HARIAN JAYA, Cawang, 08128309471
- ANTO'S, Kalimalang, 08129256715
- DAVID OXTO, Stasiun KA Senen, 9119180
- PURBA ST, Stasiun KA Senen, 0816974343
- TAMORA, Stasiun KA Senen, 9119175
- ARITONANG, Budi Utomo, 9220669
- RAELMAN, Budi Utomo, 9238167
- SIHITE, Budi Utomo, 9214526 ■ PURBA K, Kuningan, 5264955 ■ NAIBAHO, Cawang, 8577453
- SIMATUPANG, Cillilitan, 80880572
- SIMALUNGUN, Kramat, 88980567
- MILU, Blok M, 7200669 ■ BERLIAN, Pramuka
- KA GROUP, Bekasi, 08129825236
- MANULLANG, Cimone, 08129590050
- YULIANI, Medan, 061-4157471
- MEDY, Surabaya, 031-83205231
- BIRO JABAR, Bandung, 022-4240689

Atau Hubungi

BAGIAN SIRKULASI

E-mail: sirkulasi@tokohindonesia.com

021-83701736 - 9101871

the experience site

THE EXCELLENT BIOGRAPHY JANGAN BELI KUCING DALAM KARUNG

**KENALI TOKOH
SEBELUM DIPILIH**

e-ti.com
TokohIndonesia.com
TokohNasional.com
ensiklopedi.com



ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

PENGALAMAN GURU TERBAIK

SITUS GUDANG PENGALAMAN

dibangun menjadi

ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Tempat Anda menggali dan membagi pengalaman dengan mudah dan efektif, tanpa batas jarak, ruang dan waktu.

www.tokohindonesia.com

www.ensiklopedi.com

www.e-ti.com

Dilengkapi

Majalah TokohIndonesia

MAJALAH BIOGRAFI PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Redaksi:

E-mail: redaksi@tokohindonesia.com

021-8301736

The Excellent Biography



ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA



TokohIndonesia®

www.tokohindonesia.com